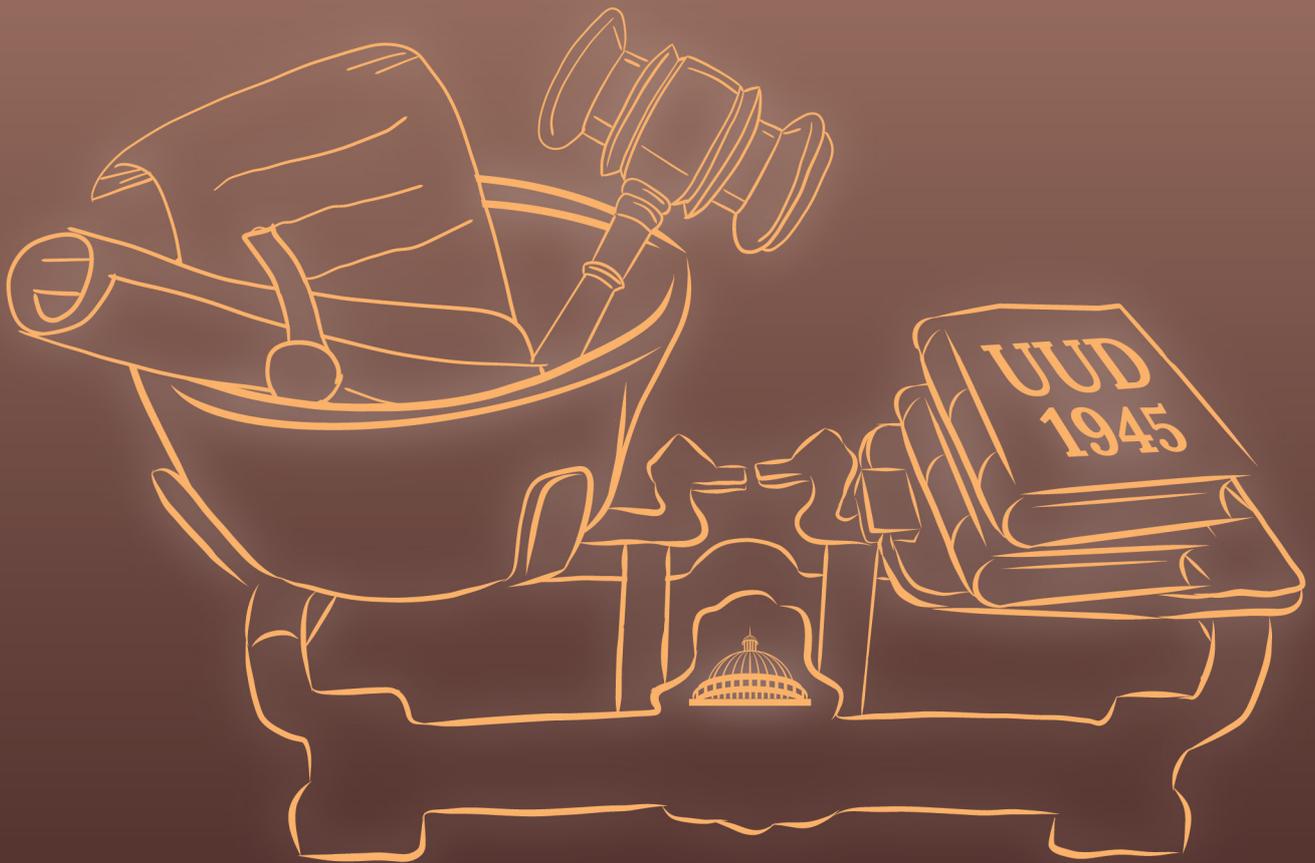




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KALIBRASI TAFSIR KONSTITUSI



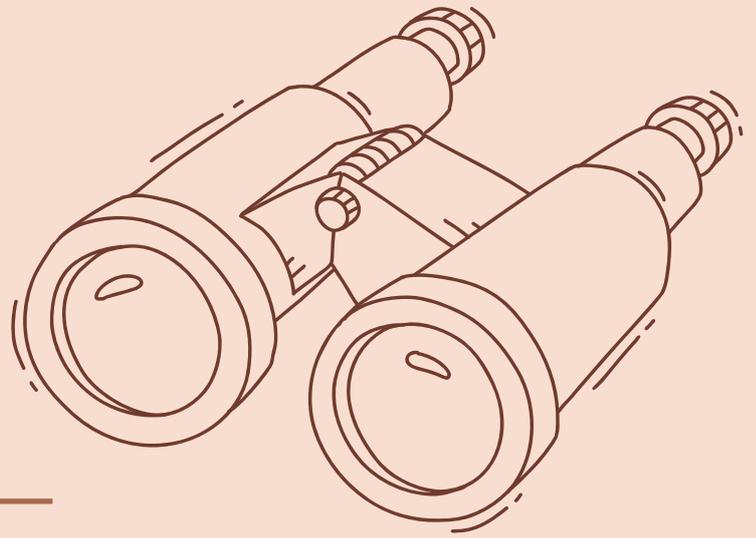
LAPORAN TAHUNAN 2023
MAHKAMAH KONSTITUSI



**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

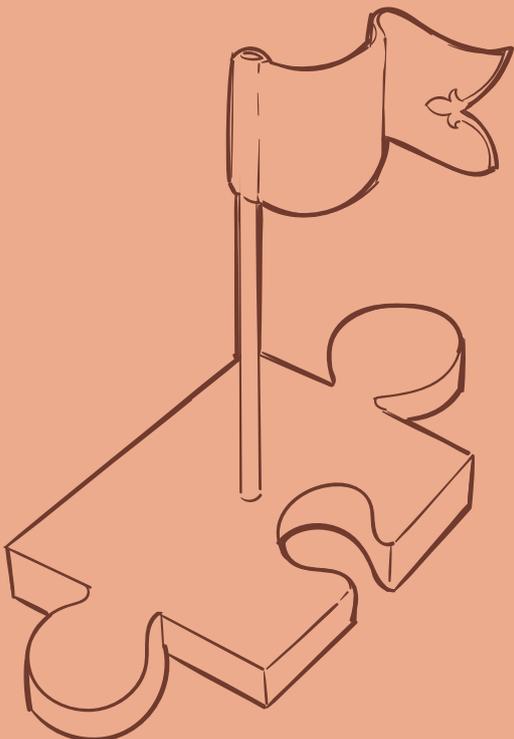
2023

VISI



**MENEGAKKAN KONSTITUSI
MELALUI PERADILAN
YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

MISI



- 1** **MEMPERKUAT INTEGRITAS
PERADILAN KONSTITUSI**
- 2** **MENINGKATKAN
KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA DAN
PENYELENGGARA NEGARA**
- 3** **MENINGKATKAN
KUALITAS PUTUSAN**

KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YANG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK:

- 1** MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
- 2** MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR
- 3** MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
- 4** MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM
- 5** WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR

BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022, MK BERWENANG MEMUTUS PERKARA PERSELESIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



SAPTA KARSA HUTAMA

1

PRINSIP INDEPENDENSI

Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dan tekanan dari luar.

2

PRINSIP KETAKBERPIHAKAN

Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak serta menampilkan perilaku netral baik di dalam maupun di luar persidangan.

3

PRINSIP INTEGRITAS

Hakim konstitusi memiliki kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas secara profesional.

4

PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN

Hakim konstitusi mampu menempatkan dengan tepat serta berperilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi.

KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

5

PRINSIP KESETARAAN

Hakim konstitusi memperlakukan semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain (*equal treatment*).

6

PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAMAAN

Hakim konstitusi senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi yang menggambarkan kecermatan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

7

PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSANAAN

Hakim konstitusi bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat.



PMKNomor09/PMK/2006tentangPemberlakuan
DeklarasiKodeEtikdanPerilakuHakimKonstitusi

PENGANTAR

The image features a solid, muted brown background. In the lower-left quadrant, there is a complex, abstract geometric pattern. This pattern is composed of various overlapping shapes, including circles, semi-circles, and rounded rectangles, in a range of brown and beige tones. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and minimalist.

Dua dasawarsa yang lalu, rahim reformasi melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, MK menjadi fenomena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ikhtiar MK menjadi lembaga yang modern dan tepercaya menjadi paradigma disrupsi dunia peradilan.

Sejarah telah menoreh jejak langkah Mahkamah dalam khidmah mengawal konstitusi. Pintu keadilan selalu terbuka. Akses menuju keadilan dapat ditempuh secara daring maupun luring. MK meretas akses menuju keadilan menjadi mudah, dan tanpa biaya.

Banyak dinamika dalam dua dasawarsa mengayuh bahtera. Salah satu bab sejarah fenomenal terjadi pada 2023. Menjelang Pemilu 2024, MK menjatuhkan putusan-putusan penting yang bersejarah. Pada pertengahan 2023, MK menjatuhkan putusan yang menyita perhatian publik, yaitu Putusan tentang Sistem Pemilihan Terbuka atau Tertutup. Atensi publik kembali menyoroti MK dengan intensitas yang cukup tinggi, saat MK menjatuhkan putusan tentang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Ruang-ruang virtual media sosial dan media massa selama berminggu-minggu semarak mendiskusikan putusan MK ini.

Imbas dari dinamika pasca-putusan soal batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk pertama kalinya dalam sejarah, MK menggelar dua kali pemilihan ketua pada 2023. Bulan Maret dan November 2023 menjadi saksi pergantian kepemimpinan MK. Sebuah episode penting dalam lembaran sejarah MK.

Tentu ada hikmah di balik dinamika sejarah yang telah terjadi. Hikmah di balik peristiwa sejarah menjadi bahan muhasabah, introspeksi, kontemplasi, dan refleksi untuk merumuskan proyeksi yang lebih baik di masa depan.

Bertolak dari kerangka itulah, kami merangkai kisah khidmah MK dalam melaksanakan kewenangan sepanjang 2023 dalam buku laporan tahunan. Tema Laporan Tahunan 2023 adalah “Kalibrasi Tafsir Mahkamah Konstitusi”. Tema ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan manifestasi dari tekad MK untuk memposisikan konstitusi sebagai panduan utama dalam mengawal demokrasi. Kalibrasi dalam tafsir MK menentukan arah dalam menafsirkan serta menjalankan prinsip-prinsip konstitusional.

Laporan tahunan ini merupakan sinopsis dari refleksi perjalanan MK selama 2023. Melalui laporan tahunan ini, MK memberikan gambaran menyeluruh tentang permohonan perkara dan putusan, serta kiprah MK dalam kancan nasional maupun global. Kami berharap laporan ini akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi yang tertarik pada perkembangan hukum dan konstitusi, dan umumnya bagi seluruh warga negara Indonesia.

Menapaki perjalanan sepanjang 2023, MK juga menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Sistem informasi yang lebih terbuka dan aksesibilitas yang ditingkatkan menjadi langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat.

Akhirulkalam, tiada gading yang tak retak. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam khidmah menjaga amanah menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional.

KALIBRASI TAFSIR KONSTITUSI

LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2023

xxxviii + 76 hal; 210 x 297 mm
Cetakan Pertama, Januari 2024

MAHKAMAH KONSTITUSI

Penerbit

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23529000

email: office@mkri.id

www.mkri.id

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH Suhartoyo
Saldi Isra
Anwar Usman
Arief Hidayat
Wahiduddin Adams
Manahan M.P. Sitompul
Enny Nurbaningsih
Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
M. Guntur Hamzah

PENGARAH Heru Setiawan
Muhidin

PENANGGUNG JAWAB Heru Setiawan

KOORDINATOR Budi Wijayanto
Fajar Laksono
Triyono Edy Budhiarto
Wiryanto
Ida Ria Tambunan
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Teguh Wahyudi
Elisabeth
Sigit Purnomo
Sri Handayani
Pan M. Faiz

KETUA DAN PENYELARAS AKHIR Fajar Laksono

SEKRETARIS Mutia Fria Darsini

DESAIN COVER Hermanto

DESAIN DAN TATA LETAK Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman
Hermanto

DOKUMENTASI FOTO Ifa Dwi Septian
R. Widjaya
Fauzan Febriyan

INFOGRAFIS Zahra Marida Putri
Ilham Erwin

PENULIS Nur Rosikin
Lulu Anjarsari P.
Sri Pujianti
Utami Argawati
Ilham Wiryadi
Bambang Panji Erawan
Bayu Wicaksono

BAHAN DAN DATA Tiara Agustina
Fitri Yuliana
Raisa Ayudhita
Andhini Sayu Fauzia
Rudi Kurniawan

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	ii
KEWENANGAN	iii
SAPTA KARSA HUTAMA	iv
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PUBLIKASI MK	xi
HAKIM KONSTITUSI	xiii
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI	xxiii
PANITERA DAN SEKRETARIS JENDERAL	xxix
PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	1
MEMPERKUAT INTEGRITAS DAN INOVASI ICT	27
MENGASAH NALAR BERKONSTITUSI	41
PENGHARGAAN	61
MENYONGSONG PEMILU 2024	67
LAMPIRAN	75
GLOSARIUM	76

PUBLIKASI MK



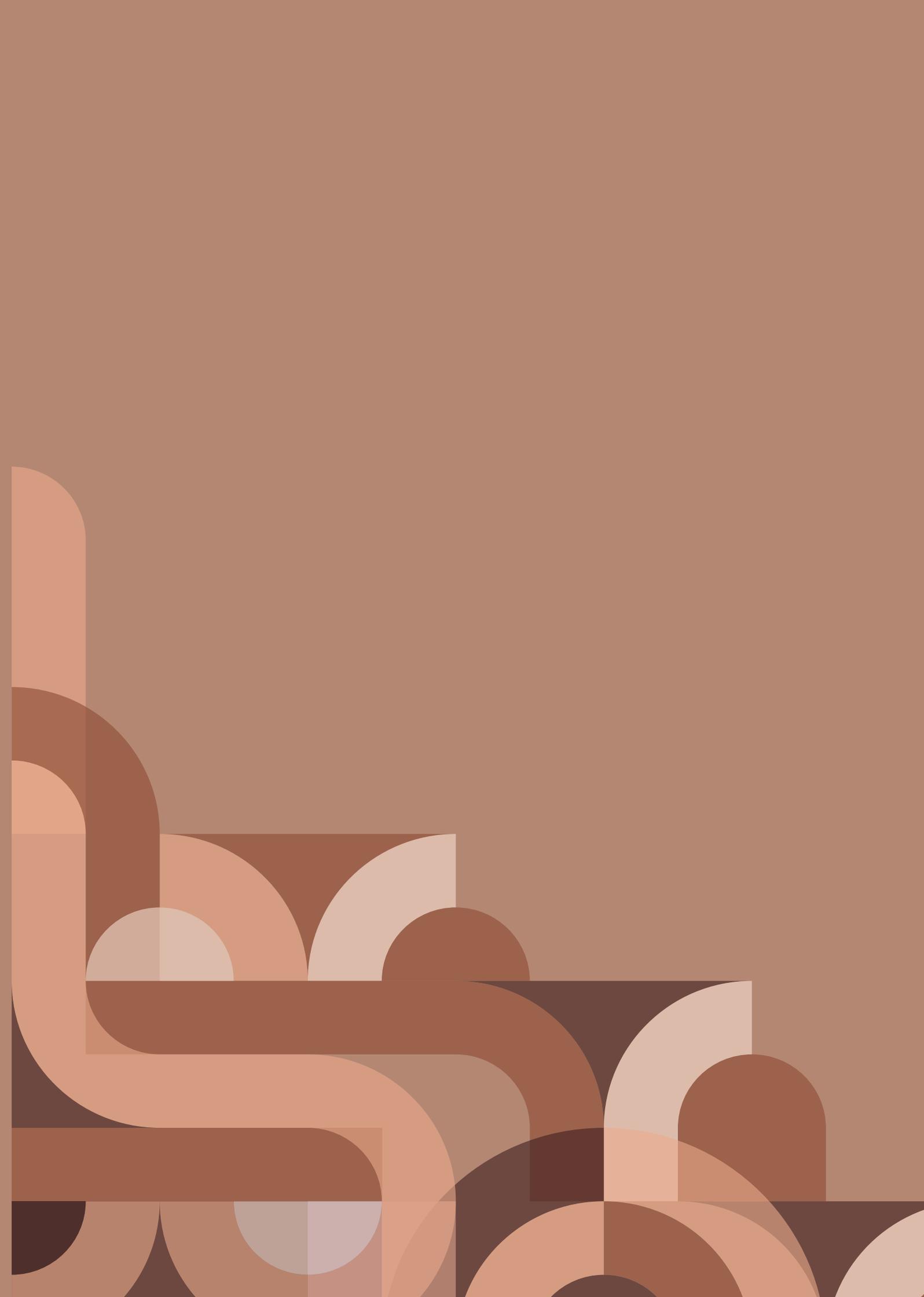
MAJALAH KONSTITUSI



JURNAL KONSTITUSI



CONSTITUTIONAL REVIEW





**PIMPINAN MK
DARI MASA KE MASA**

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
(19 Agustus 2003-19 Agustus 2008)



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H.
(19 Agustus 2008-01 April 2013)



Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
(05 April 2013-05 Oktober 2013)



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(06 November 2013-07 Januari 2015)



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
(12 Januari 2015-14 Juli 2017)
(14 Juli 2017-02 April 2018)



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
(02 April 2018-02 Oktober 2020)
(20 Maret 2023-7 November 2023)



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
(9 November 2023-9 November 2028)

WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI



Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki S.H.
(19 Agustus 2003-31 Mei 2008)



Dr. Harjono, S.H., MCL
(04 Juni 2008-16 Agustus 2008)



Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
(21 Agustus 2008-31 Desember 2009)



Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
(14 Januari 2010-22 Juli 2013)



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
(05 April 2013-04 November 2013)



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
(01 November 2013-12 Januari 2015)



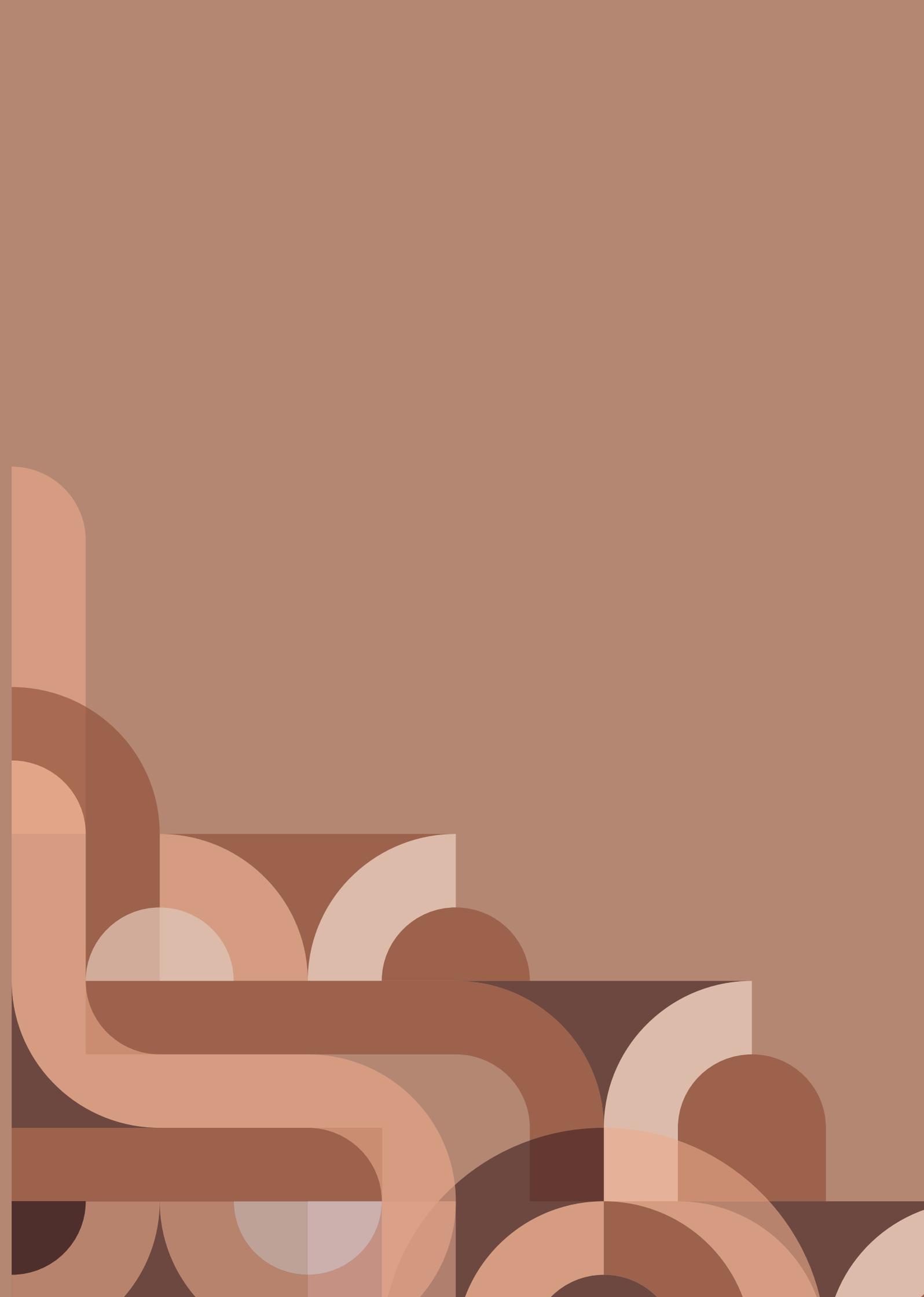
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
(14 Januari 2015 - 11 April 2016)
(11 April 2016-02 April 2018)



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM
(02 April 2018-02 Oktober 2020)



Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA
(20 Maret 2023-20 Maret 2028)





HAKIM KONSTITUSI



Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra
resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK
Masa Jabatan 2023 – 2028 pada 20 Maret 2023



PIMPINAN MK



Hakim Konstitusi Suhartoyo
resmi menjabat sebagai Ketua MK
Masa Jabatan 2023 – 2028 pada 13 November 2023



**MASA KEPEMIMPINAN
KETUA MK ANWAR USMAN
WAKIL KETUA MK SALDI ISRA
MARET 2023 - NOVEMBER 2023**



Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.

Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA

Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Manahan M. P. Sitompul

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S..

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

MASA KEPEMIMPINAN
KETUA MK SUHARTOYO
WAKIL KETUA MK SALDI ISRA
NOVEMBER 2023 - NOVEMBER 2025



Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S..

Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Manahan M. P. Sitompul

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



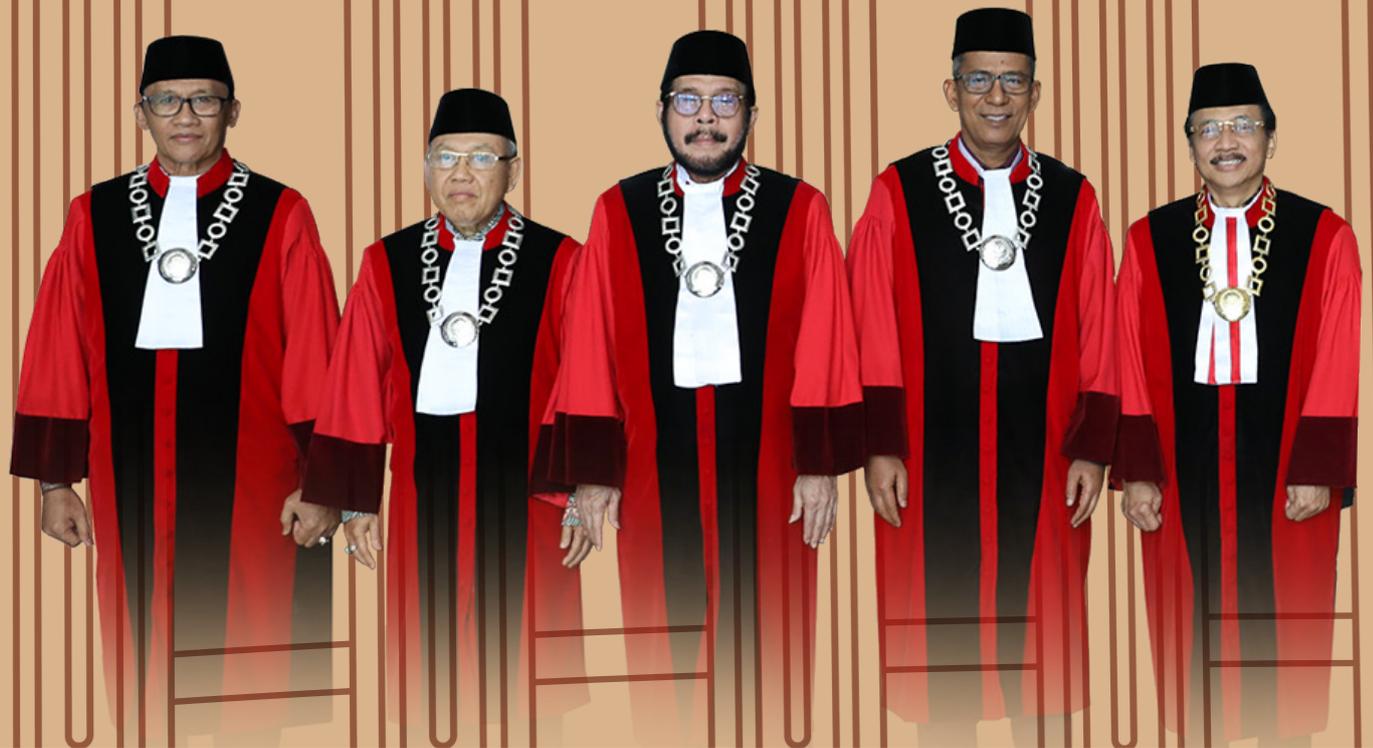
Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

**HAKIM KONSTITUSI
MANAHAN MP SITOMPUL
MEMASUKI USIA PENSIUN**



Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., MH.

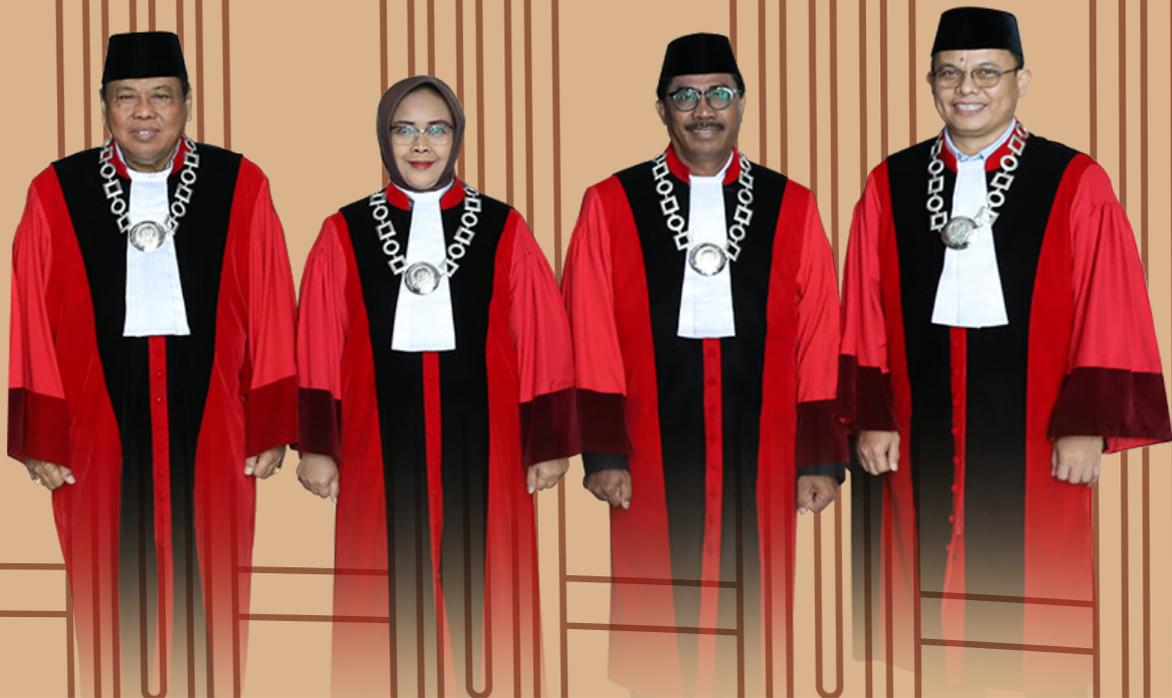
Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

**DIGANTIKAN
HAKIM KONSTITUSI
RIDWAN MANSYUR**

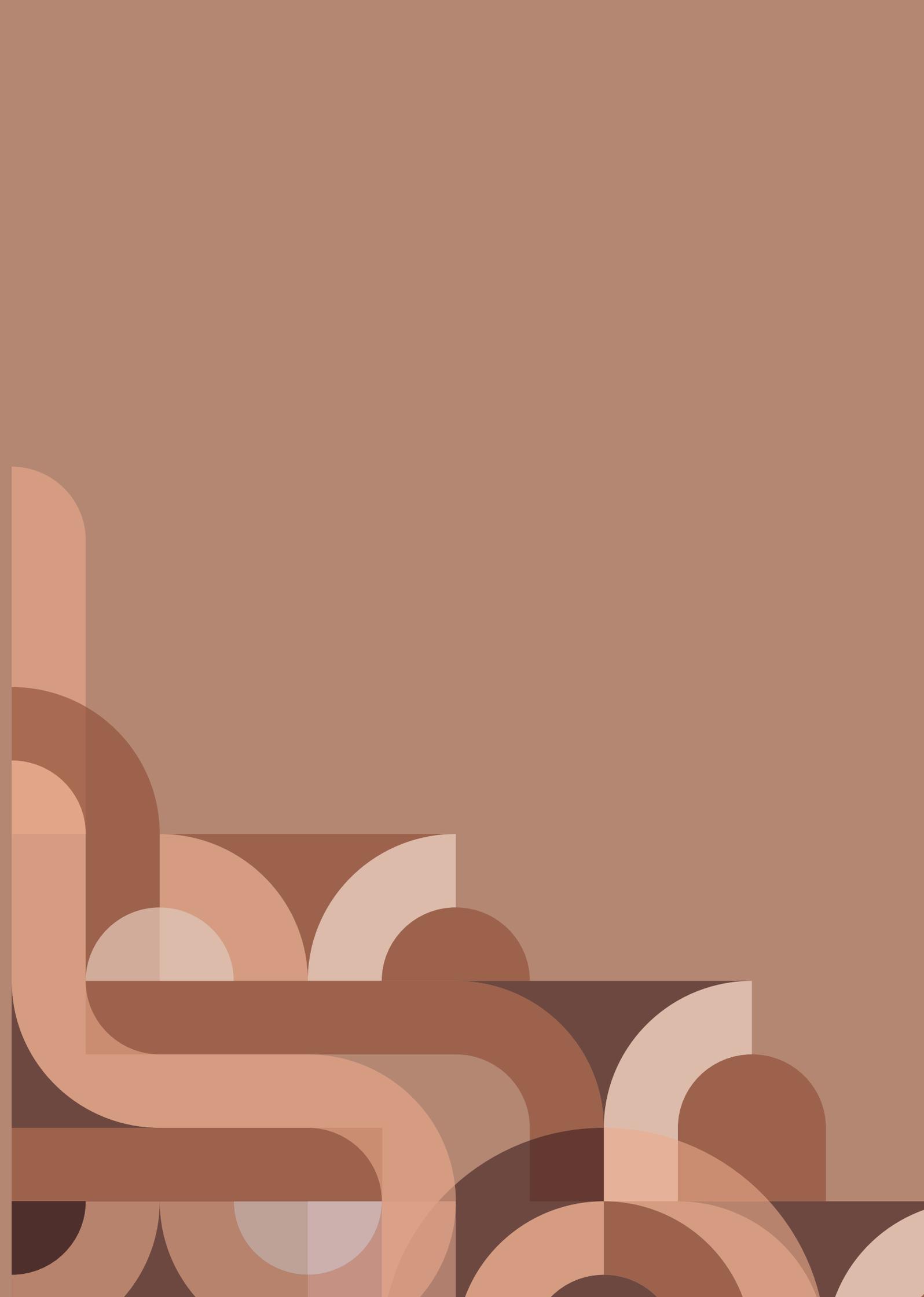


Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S..

Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





**MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**



I Dewa Gede Palguna



Enny Nurbaningsih



Sudjito

MKMK *ad hoc* atas Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022

Pada 27 Januari 2023, Harian Kompas menerbitkan artikel berjudul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah Setelah Dibacakan” yang memuat dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Atas temuan terhadap dugaan tersebut, MK merespons dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) *ad hoc*.

30 JANUARI 2023

MK mengumumkan membentuk MKMK yang terdiri dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna (tokoh masyarakat), dan Sudjito (akademisi bidang hukum)

2 FEBRUARI 2023

Ketua MK Anwar Usman menandatangani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

9 FEBRUARI 2023

Pelantikan dan pengucapan sumpah Anggota MKMK

14 FEBRUARI 2023

Registrasi Temuan dalam Buku Registrasi Laporan dan Temuan Pelanggaran Elektronik (e- BRLTP)

21 FEBRUARI 2023 – 8 MARET 2023

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

13 – 14 MARET 2023

Sidang Pemeriksaan Lanjutan

20 MARET 2023

Sidang Pengucapan Putusan





Jimly Asshiddiqie



Wahiduddin Adams



Bintan R. Saragih

MKMK *ad hoc* atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

MK menerima 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

23 OKTOBER 2023

Penetapan Keputusan Ketua MK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan MKMK yang terdiri dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie (tokoh masyarakat), dan Bintang R. Saragih (akademisi bidang hukum)

24 OKTOBER 2023

Pelantikan dan pengucapan sumpah Anggota dan Sekretariat MKMK

24 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2023

Registrasi laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku sembilan hakim konstitusi

26 OKTOBER 2023

Rapat Klarifikasi

31 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2023

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

3 NOVEMBER 2023

Sidang Pemeriksaan Lanjutan

7 NOVEMBER 2023

Sidang Pengucapan Putusan

27 NOVEMBER 2023

MKMK menyerahkan Laporan pelaksanaan tugas dan kewenangan kepada MK.





Ridwan Mansyur



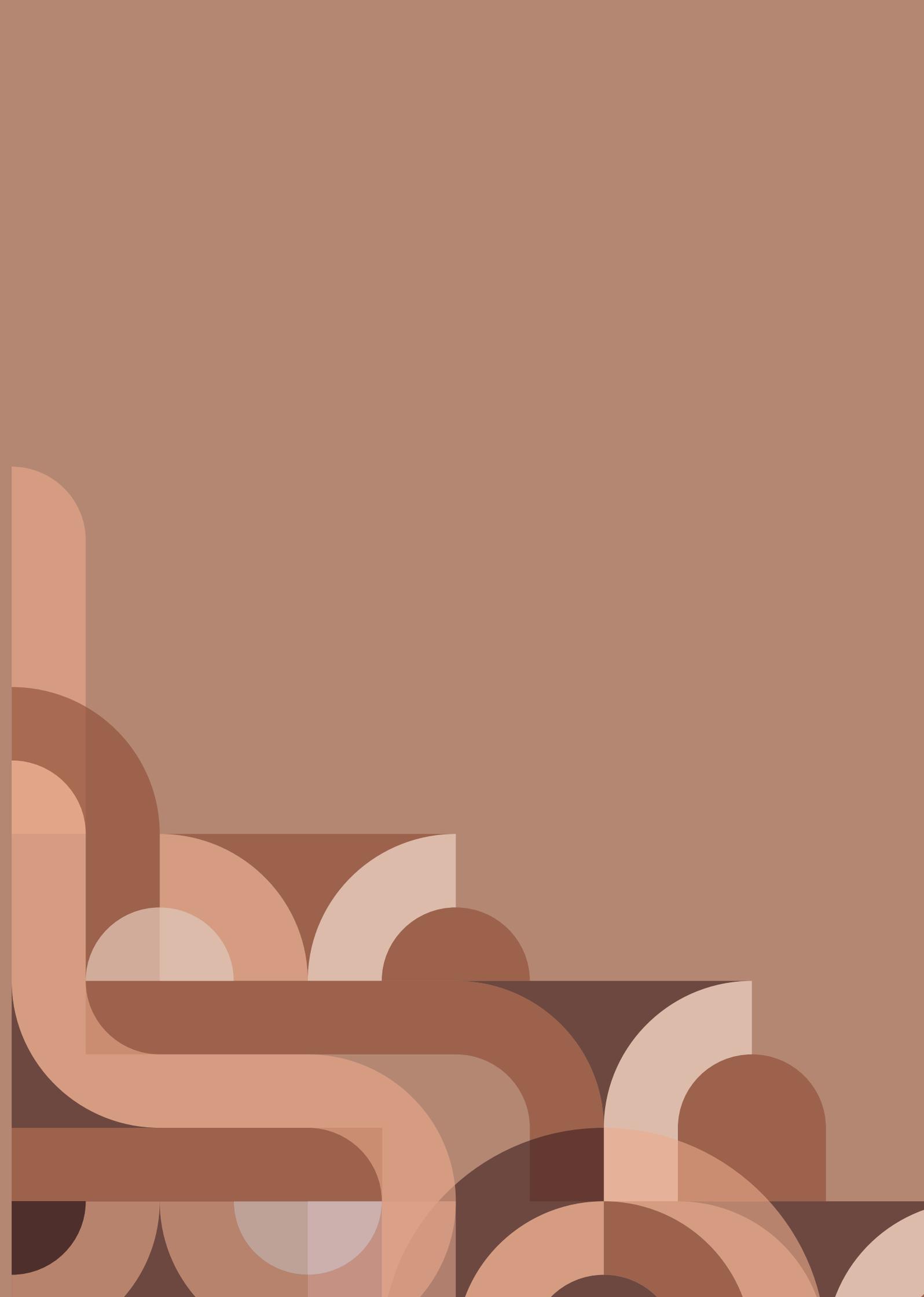
Yuliandri



I Dewa Gede Palguna

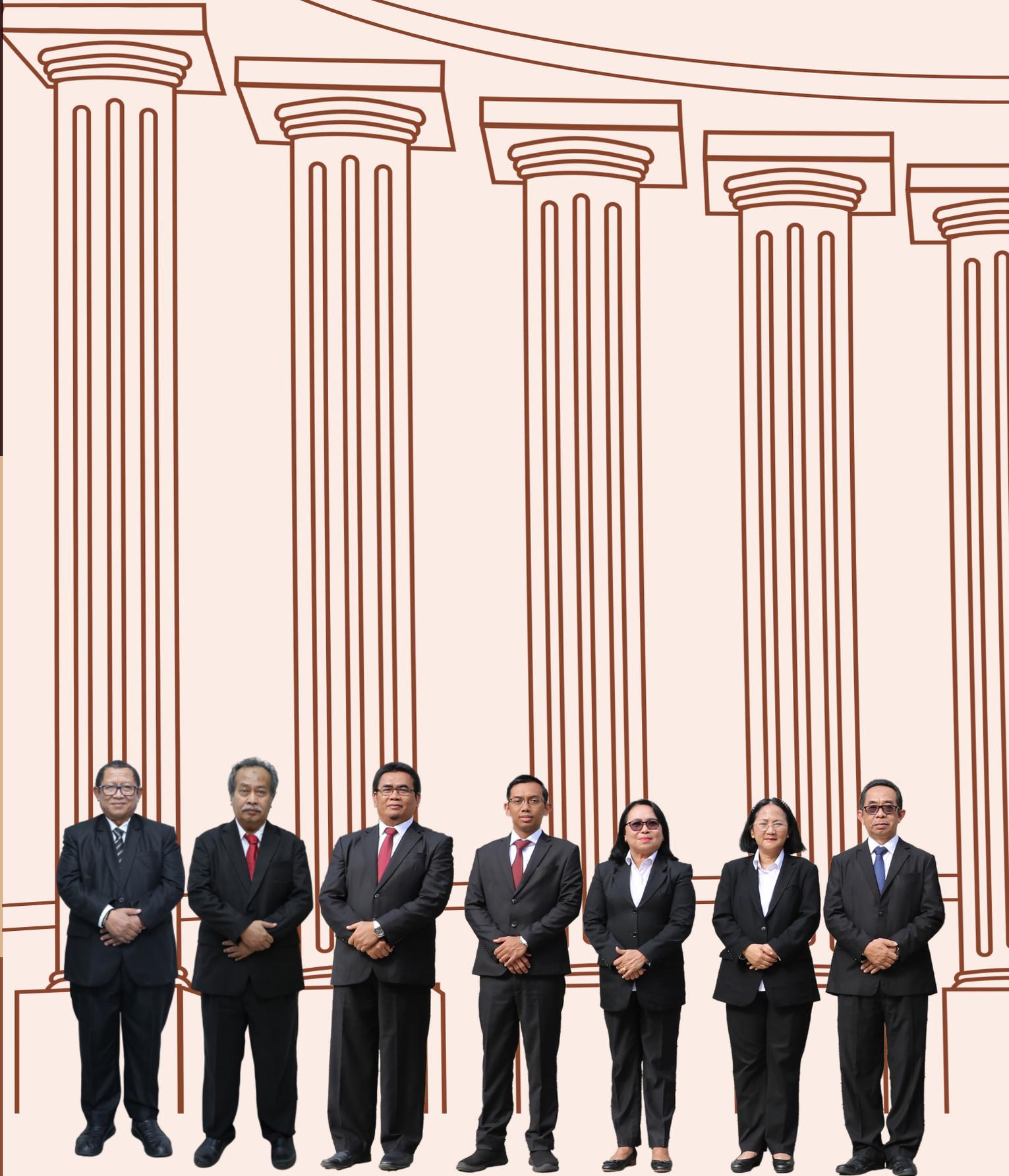
MK resmi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen. MKMK permanen terdiri dari Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mewakili hakim konstitusi aktif, Guru Besar Universitas Andalas Yuliandri mewakili akademisi berlatar belakang bidang hukum, dan I Dewa Gede Palguna mewakili tokoh masyarakat. Ketiganya dilantik pada 8 Januari 2024 dan bekerja hingga setahun ke depan.

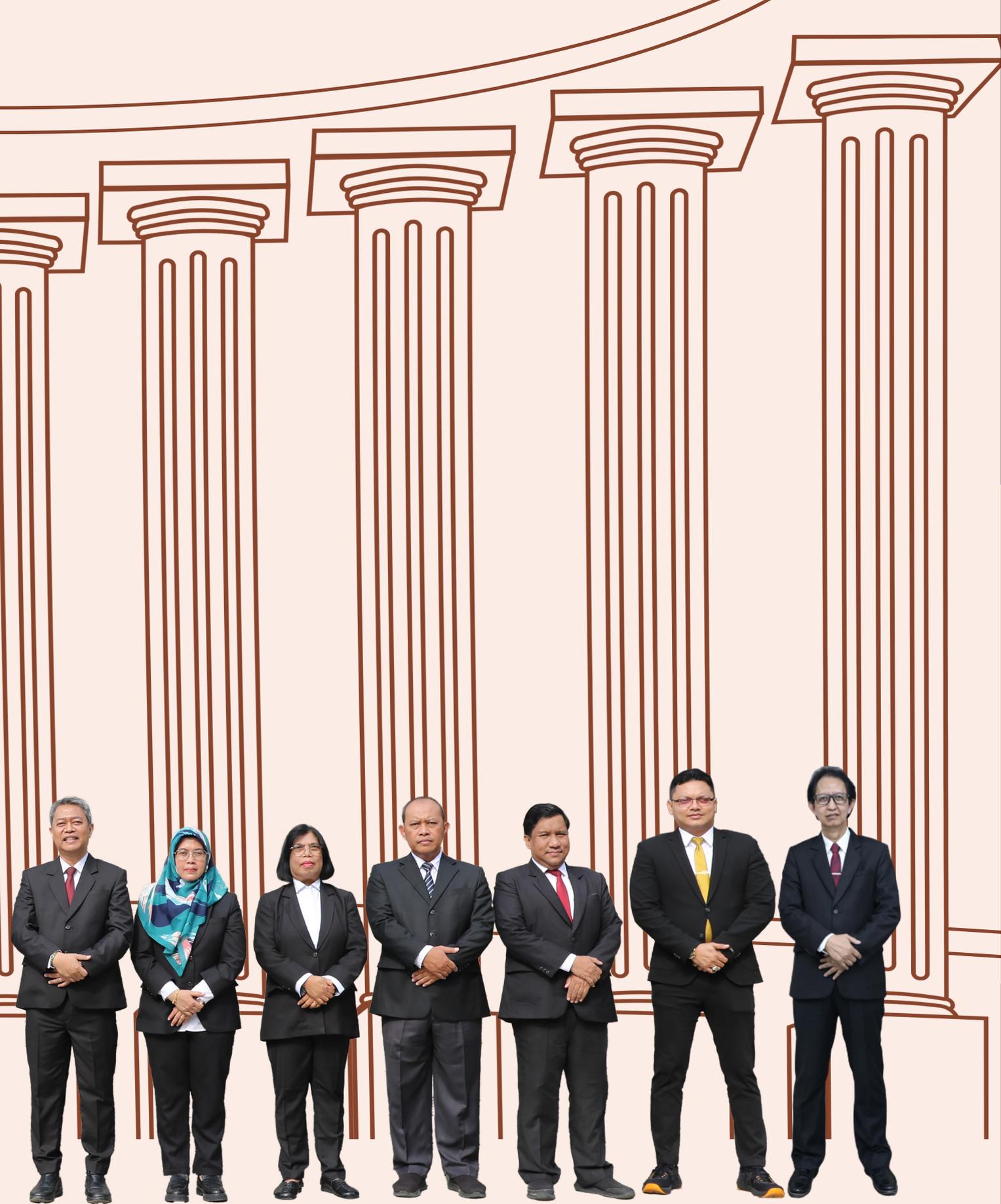


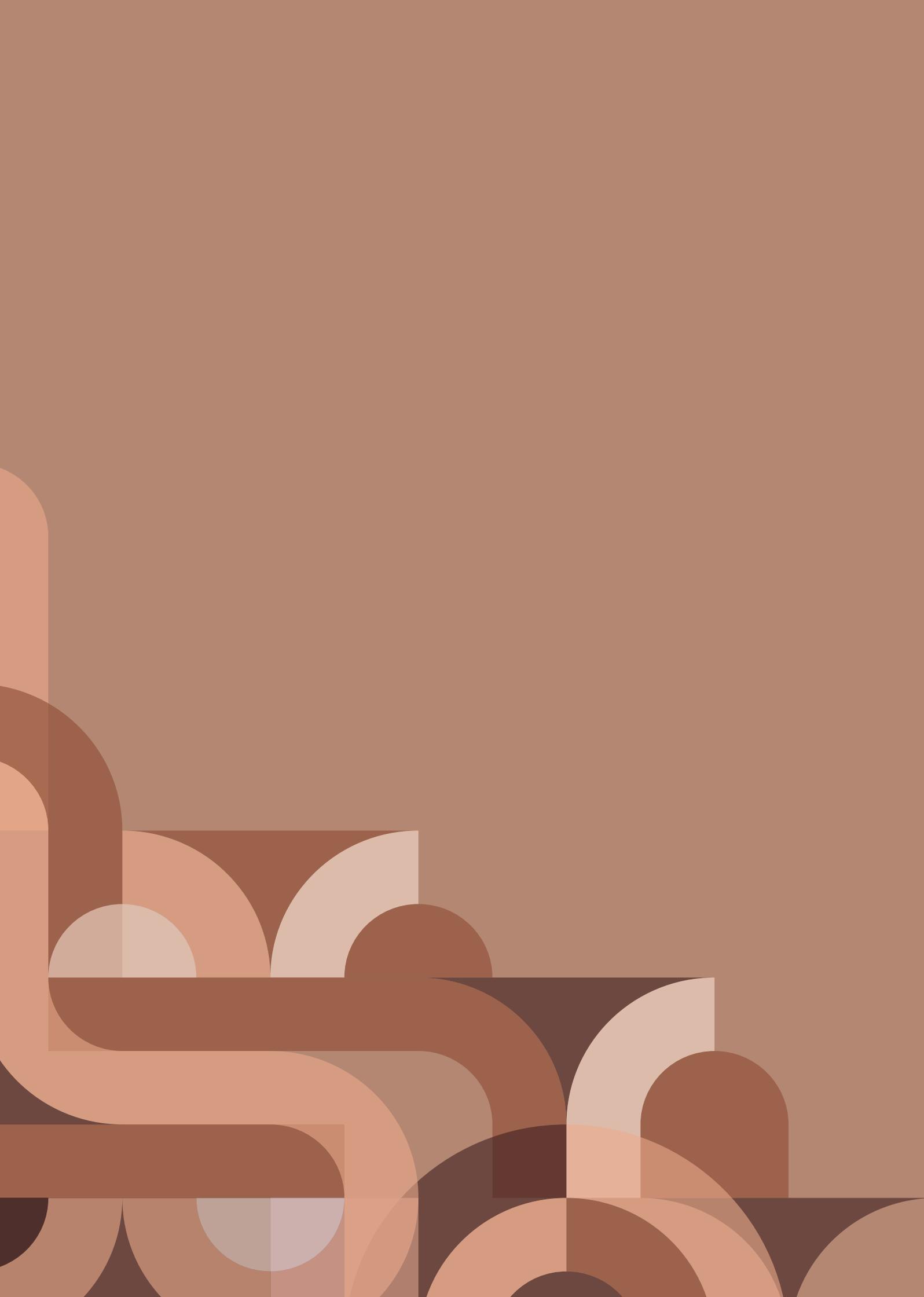




**KEPANITERAAN
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL**









PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Selama dua dasawarsa, MK telah melaksanakan tiga kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap UUD, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

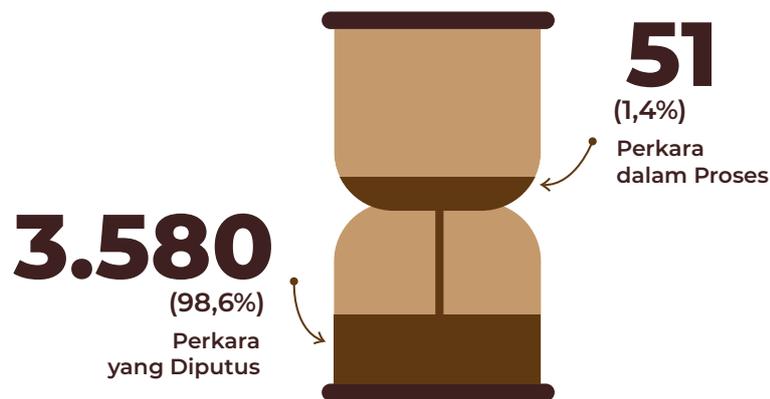
PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI 2003-2023

Selama dua dasawarsa, MK telah melaksanakan tiga kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap UUD, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Sejak 2003 hingga 31 Desember 2023, MK menerima sebanyak 3.631 perkara dengan rincian sebanyak 3.580 perkara telah diputus (98,6%) dan sebanyak 51 perkara masih dalam proses persidangan (1,4%).

PERKARA KONSTITUSI

(2003- 2023)

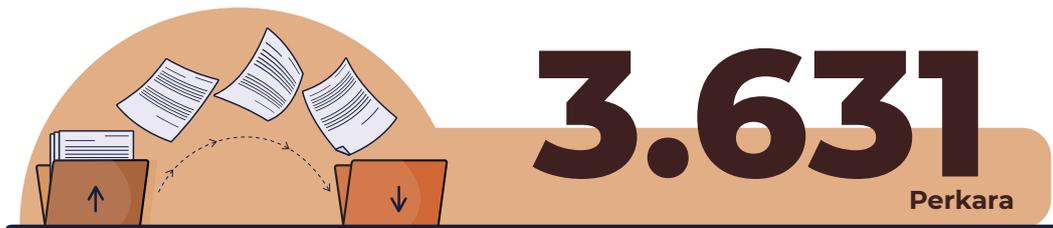


Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, perkara PUU sebanyak 1.790 perkara (49%); perkara SKLN sebanyak 29 perkara (1%); perkara PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil

Presiden 676 perkara (19%); serta perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.136 perkara (31%).

JUMLAH PERKARA KONSTITUSI

(2003- 2023)



Dari jumlah perkara tersebut, MK telah memutus 3.580 perkara, yang terdiri atas 1.739 putusan PUU (48%); 29 putusan SKLN (1%); 676 putusan PPHU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden (19%); dan 1.136 putusan PHP Kada (32%).

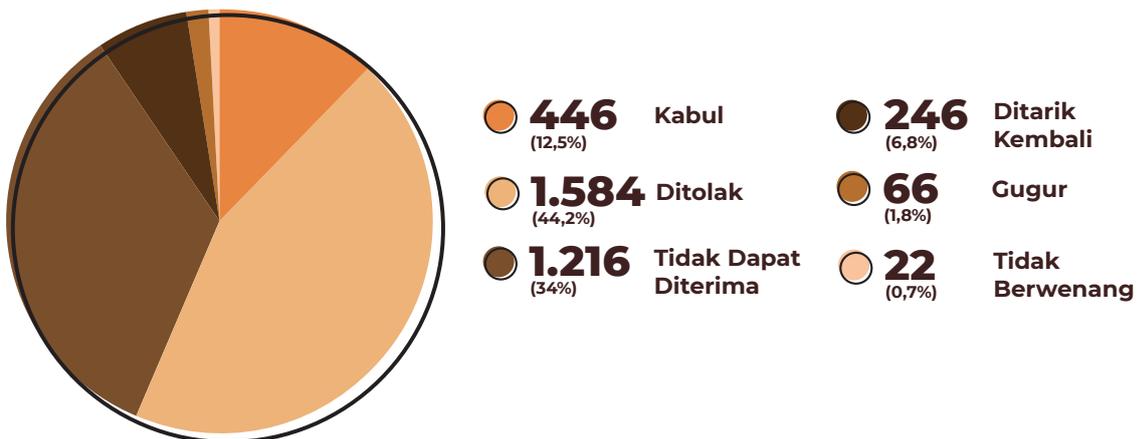
Jika dipilah berdasarkan amar, maka 446 putusan dikabulkan (12,5%); 1.584 putusan ditolak (44,2%); 1.216 putusan tidak dapat diterima (34%); 246 perkara ditarik kembali (6,8%); 66 perkara gugur (1,8%) dan 22 perkara dinyatakan MK tidak berwenang (0,7%).

**JUMLAH PUTUSAN BERDASARKAN KEWENANGAN
(2003- 2023)**



Dari pelaksanaan tiga kewenangan selama dua dasawarsa, dinamika dan perkembangan masing-masing kewenangan dapat diuraikan sebagai berikut.

PUTUSAN BERDASARKAN AMAR
(2003- 2023)

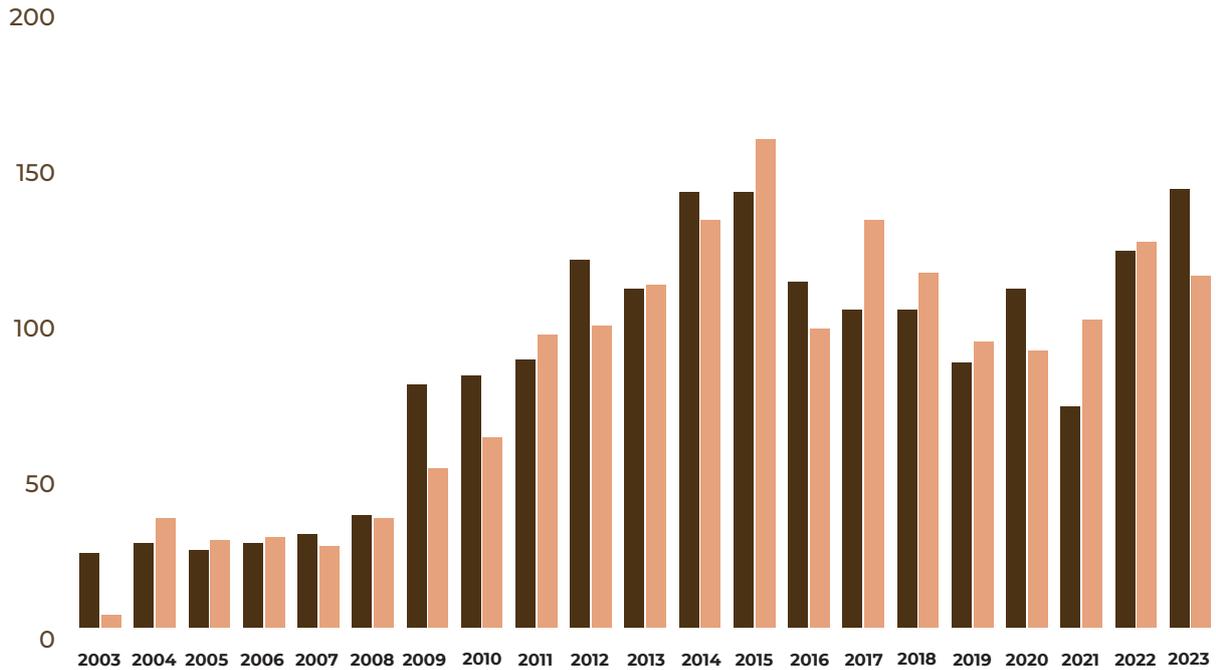


PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

jumlah perkara dan putusan per tahun dapat dilihat dari Grafik 1.1 di bawah ini.

Dari keseluruhan 1.790 perkara PUU, MK telah memutus 1.739 perkara. Perbandingan

JUMLAH PERKARA DAN PUTUSAN PUU 2003-2023



1.790 Jumlah Perkara

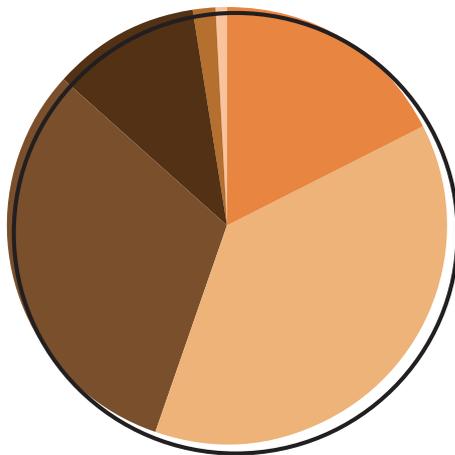
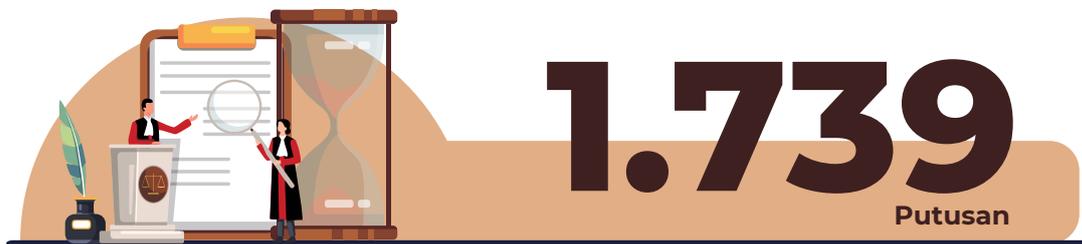
1.739 Jumlah Putusan

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Putusan
2003	24	4
2004	27	35
2005	25	28
2006	27	29
2007	30	26
2008	36	35
2009	78	51
2010	81	61
2011	86	94
2012	118	97
2013	109	110
2014	140	131
2015	140	157
2016	111	96
2017	102	131
2018	102	114
2019	85	92
2020	109	89
2021	71	99
2022	121	124
2023	168	136

Putusan merupakan akhir dari penanganan perkara Pengujian Undang-Undang. Jika berdasarkan amar, dari 1.739 putusan, 309 putusan dikabulkan (17,8%); 659 putusan ditolak (37,8%); 541 putusan

tidak dapat diterima (31,2%); 191 putusan ditarik kembali (10,8%); 25 perkara gugur (1,4%); serta 14 perkara dinyatakan MK tidak berwenang (1%).

JUMLAH PUTUSAN PUU BERDASARKAN AMAR



- **309**
(17,8%) **Kabul**
- **191**
(10,8%) **Ditarik Kembali**
- **659**
(37,8%) **Ditolak**
- **25**
(1,4%) **Gugur**
- **541**
(31,2%) **Tidak Dapat Diterima**
- **14**
(1%) **Tidak Berwenang**

Mengenai Ketetapan, sesuai ketentuan Pasal 75 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang, MK menerbitkan putusan berupa Ketetapan tentang permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah; Pemohon menarik kembali permohonannya;

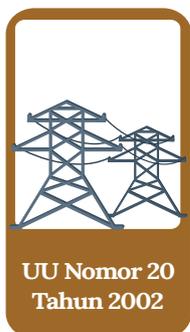
dan Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan. Jika putusan dikategorikan ke dalam putusan dan ketetapan, 1.739 putusan terdiri dari 1.509 Putusan (87%) dan 230 Ketetapan (13%).

PERBANDINGAN JUMLAH KETETAPAN DAN PUTUSAN PUU



Sejak 2003 hingga 13 Desember 2023, 356 undang-undang dimohonkan pengujian ke MK. Dari jumlah tersebut, 11 undang-

undang dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan.



UU Nomor 20
Tahun 2002

Ketenagalistrikan
No. Perkara
001-021-022/PUU-1/2003



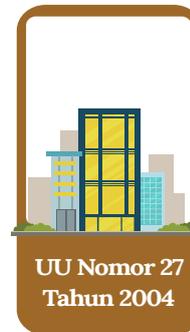
UU Nomor 16
Tahun 2003

Terorisme
No. Perkara
013/PUU-1/2003



UU Nomor 45
Tahun 1999

**Pemekaran/Pembentukan
Provinsi Papua**
No. Perkara
018/PUU-1/2003



UU Nomor 27
Tahun 2004

**Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi**
No. Perkara
006/PUU-IV/2006



UU Nomor 9
Tahun 2009

Badan Hukum Pendidikan
No. Perkara
11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009



UU Nomor 6
Tahun 1954

**Penetapan Hak Angket
Dewan Perwakilan Rakyat**
No. Perkara
8/PUU-VIII/2010



UU Nomor 17
Tahun 2012

Perkoperasian
No. Perkara
28/PUU-XI/2013



UU Nomor 7
Tahun 2004

Sumber Daya Air
No. Perkara
85/PUU-XI/2013



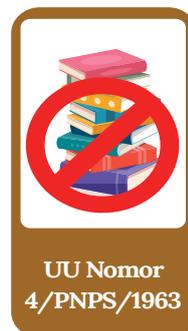
UU Nomor 4
Tahun 2014

Mahkamah Konstitusi
No. Perkara
1-2/PUU-XII/2014



UU Nomor 16
Tahun 2008

**Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008**
No. Perkara
13/PUU-VI/2008



UU Nomor
4/PNPS/1963

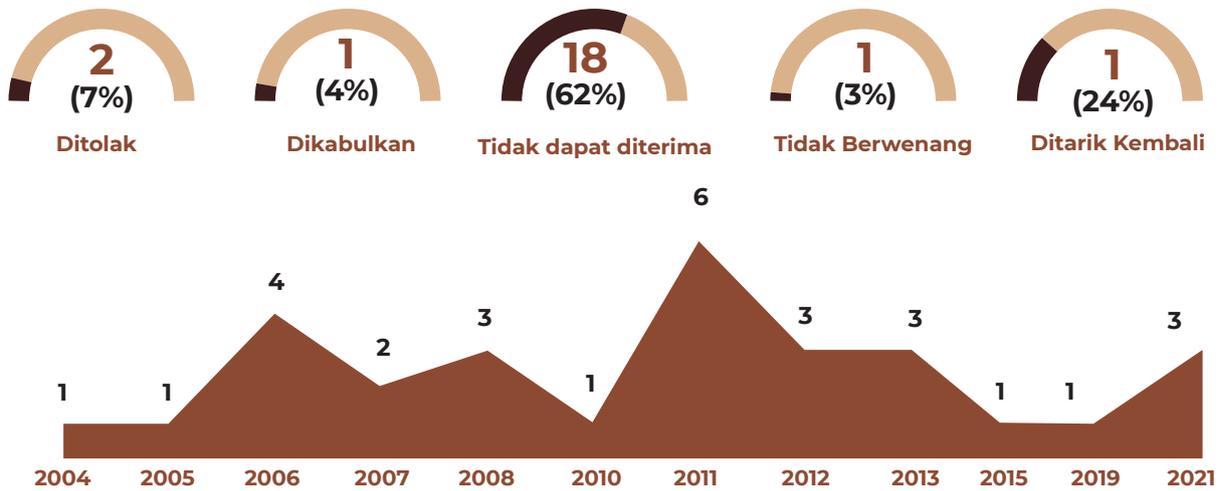
**Pengamanan Terhadap
Barang-Barang Cetak
Yang Mengganggu
Ketertiban Umum**
No. Perkara
6-13-20/PUU-VIII/2010

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)

Jumlah perkara SKLN tidak sebanyak perkara lainnya, yaitu 29 Perkara.

Perkembangan jumlah perkara SKLN dari tahun ke tahun dan jumlah putusan berdasar amar dapat dilihat dalam grafik berikut

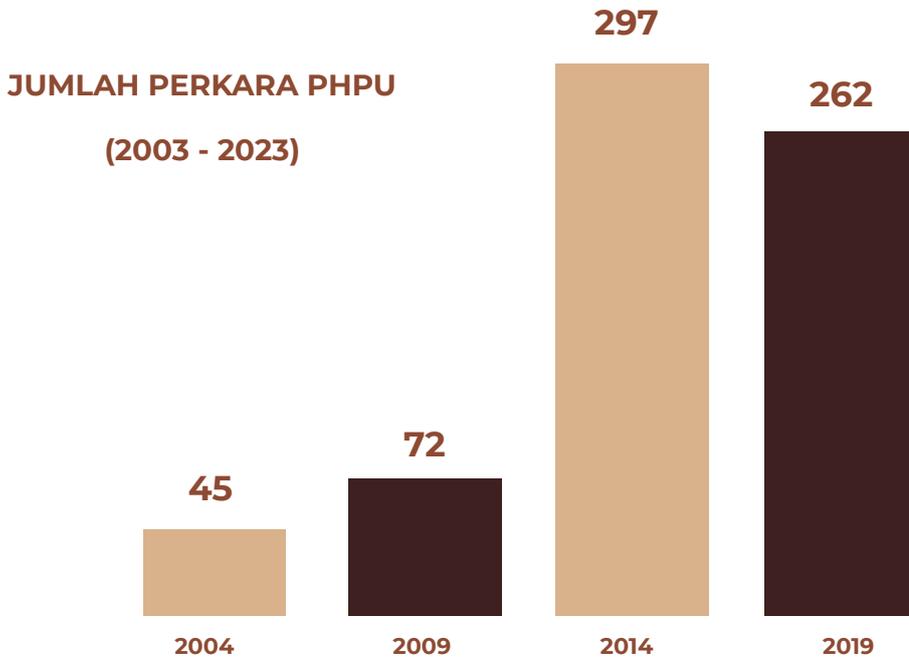
JUMLAH PERKARA SKLN



PERKARA PHPU

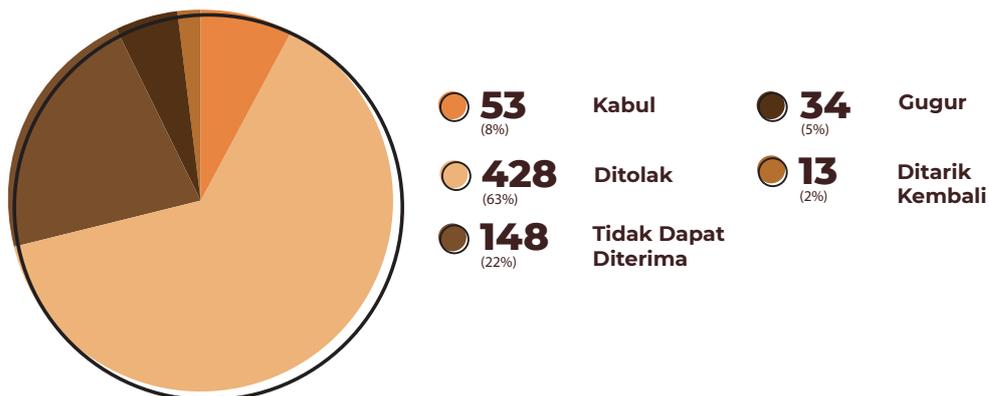
Dari empat kali penyelenggaraan Pemilu MK menangani dan memutus sebanyak 676 Perkara PHPU Presiden/Wakil Presiden

dan Legislatif. MK menangani 45 perkara pada Pemilu 2004, 72 perkara pada Pemilu 2009, 297 perkara pada Pemilu 2014, dan 262 perkara pada Pemilu 2019.



PUTUSAN PHPU BERDASARKAN AMAR

2003-2023



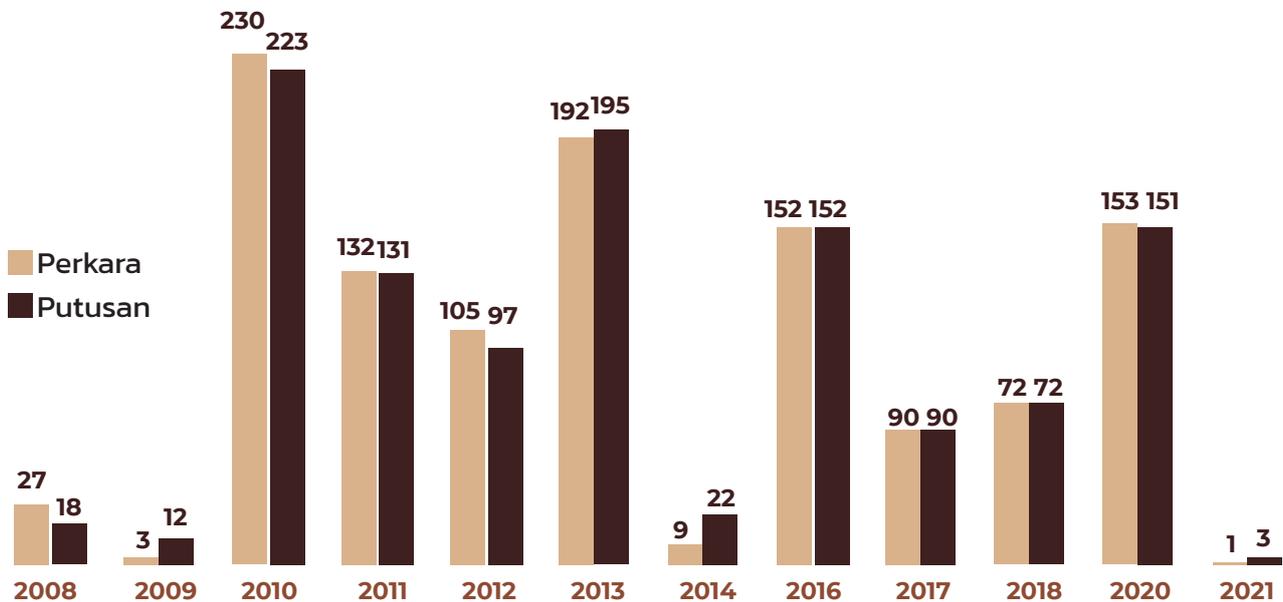
PERKARA PHP KEPALA DAERAH (PHP Kada)

Kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) mengalami dinamika sejak 2008 sampai dengan 2022. Pada 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK diberi kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada. Namun, berdasarkan putusan

Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan memutus perselisihan hasil Pilkada bukanlah kewenangan MK.

Pada 2022, berdasarkan Putusan 85/PUU-XX/2022, MK menyatakan kembali berwenang memutus perselisihan hasil Pilkada. Sejak 2008 hingga 2023 MK menangani dan memutus 1.136 perkara Perselisihan Hasil Pilkada. Perbandingan jumlah perkara dan dan Putusan PHP Kada dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA DAN PUTUSAN PHP KADA



JUMLAH PERSIDANGAN

Untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 3.631 perkara di tiga kewenangan, termasuk perkara PHPKADA, MK menggelar

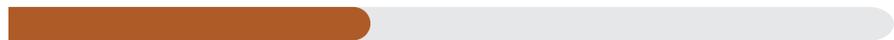
9.041 persidangan. Jumlah persidangan untuk masing-masing kewenangan, dapat dilihat pada Diagram sebagai berikut.

JUMLAH PERSIDANGAN 2003 - 2023



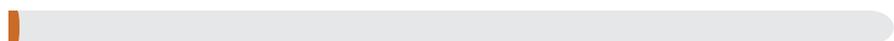
4.281

Sidang PUU



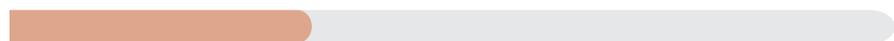
79

Sidang SKLN



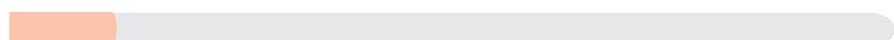
3.262

Sidang PHPU



1.419

Sidang PHPKADA

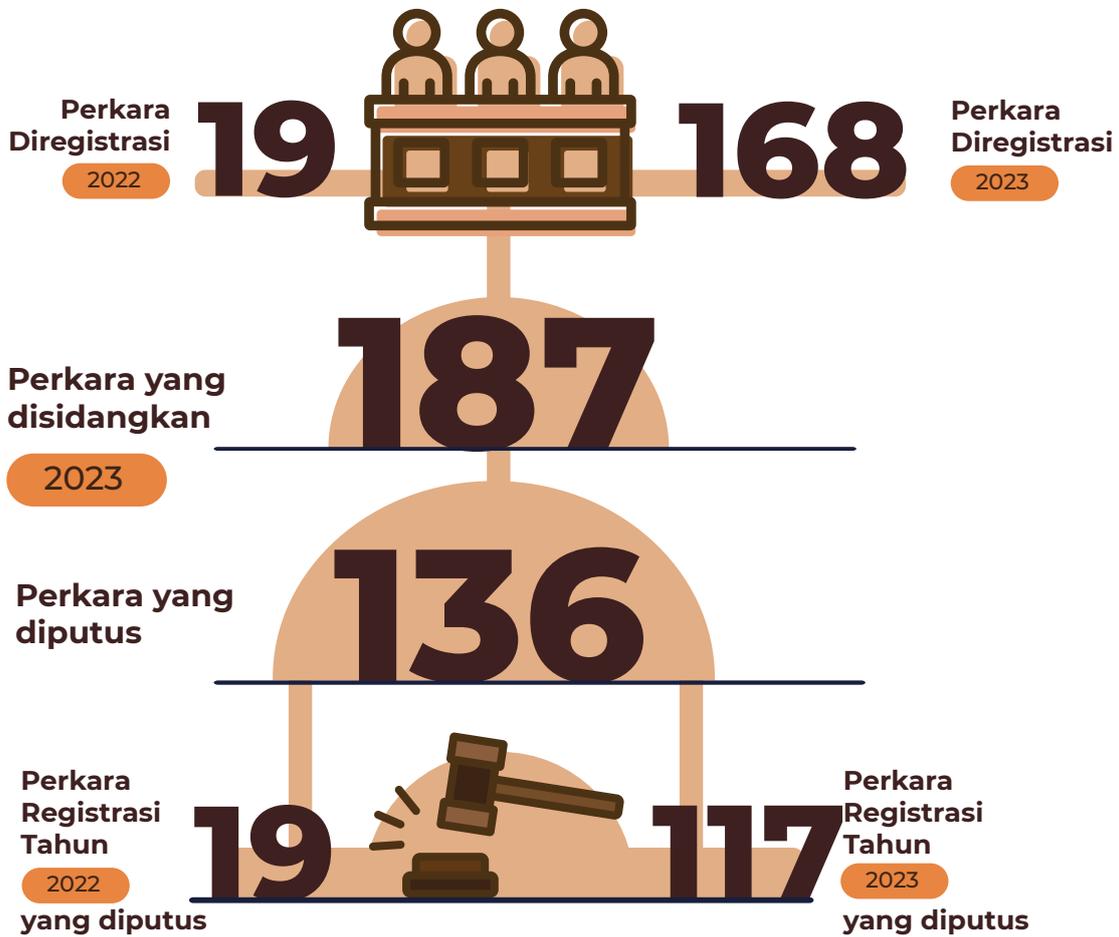


PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 2023

Pada 2023, MK menangani 187 perkara pengujian undang-undang yang terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022 dan 168 perkara yang diregistrasi tahun

2023. Hingga 31 Desember 2023, MK telah memutus sebanyak 136 perkara yang terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022 dan 117 perkara yang diregistrasi tahun 2023.

PERKARA DAN PUTUSAN PUU 2023



Jika dipilah berdasarkan amar, 136 putusan tersebut terdiri dari 13 putusan dikabulkan (9%); 57 putusan ditolak (40%); 41 putusan tidak dapat diterima (32%); dan 25 perkara ditarik kembali (19%).

Dari 136 putusan, jumlah putusan per bulan dapat dilihat pada Grafik berikut.

PUTUSAN PUU BERDASARKAN AMAR

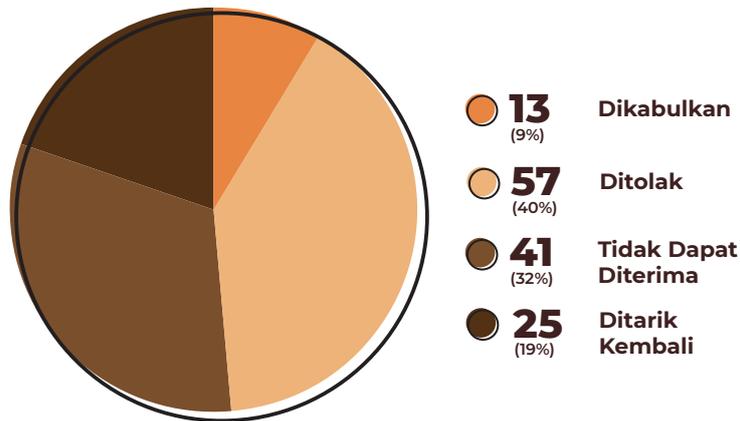
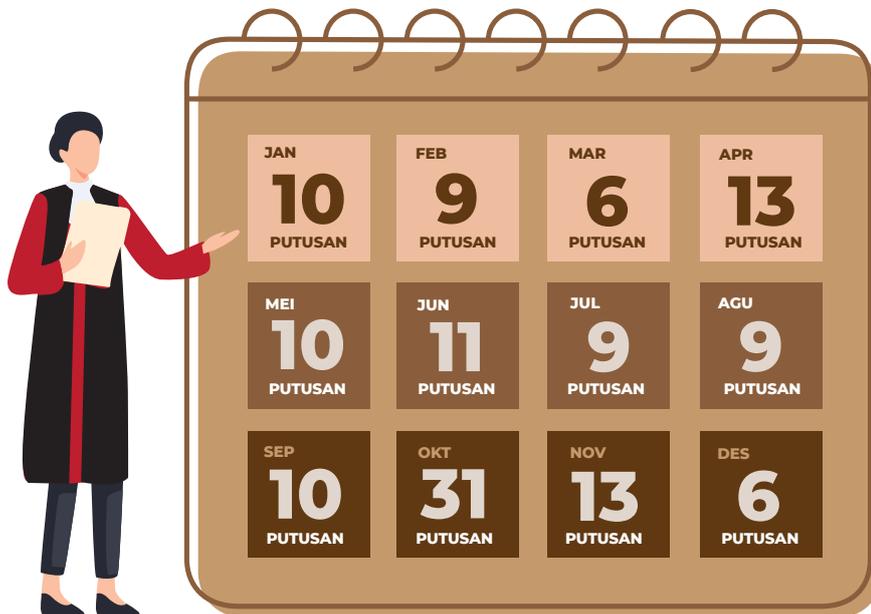


Diagram 1.12

JUMLAH PUTUSAN PUU PER BULAN



Pada 2023, 65 undang-undang dimohonkan pengujian ke MK. Dari jumlah tersebut, lima Undang-Undang paling sering diuji, yakni UU Pemilu, UU Cipta Kerja, KUHP, KUHP, dan UU Jalan.

UNDANG-UNDANG PALING SERING DIUJI TAHUN 2023

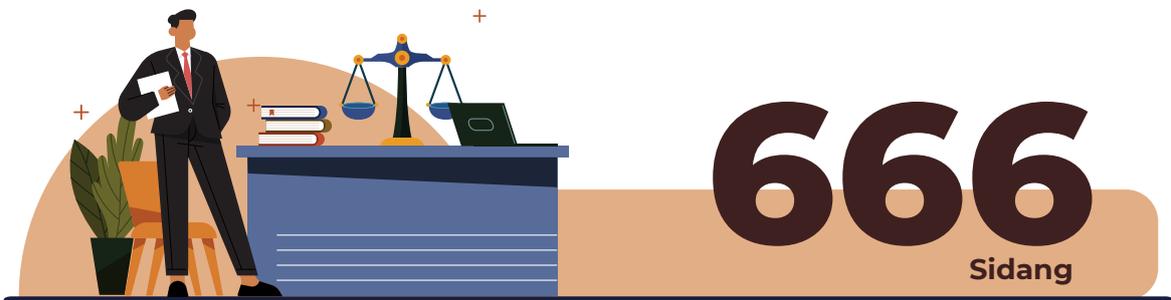


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA

Kecepatan waktu dalam menyelesaikan perkara pengujian undang-undang menjadi salah satu fokus peningkatan kinerja MK. Pada 2023, MK membutuhkan waktu penyelesaian rata-rata 52 hari per perkara. Waktu rata-rata tersebut, lebih

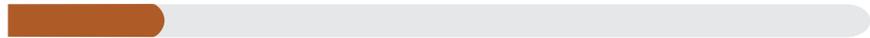
cepat dibandingkan dengan rata-rata penyelesaian perkara pada 2022, yaitu rata-rata 78 hari per perkara.

Pada 2023, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 202 perkara pengujian undang-undang, MK menggelar 666 persidangan.



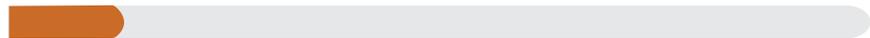
171

Sidang Pendahuluan



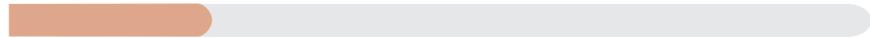
148

Sidang Perbaikan
Permohonan



213

Pemeriksaan Persidangan



136

Sidang Pengucapan
Putusan



PUTUSAN MONUMENTAL 2023

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Konstitusional

Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun, secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem

proporsional dengan daftar terbuka maupun tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Walhasil, dalam amar Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian materiil UU Pemilu yang diajukan Riyanto dkk.



Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres

MK menjatuhkan putusan monumental mengenai syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam UU Pemilu. Permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Dalam amar [Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023](#) Mahkamah memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu sehingga selengkapya berbunyi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”



Perkawinan Beda Agama di Mata MK

Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil E. Ramos Petege berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum.

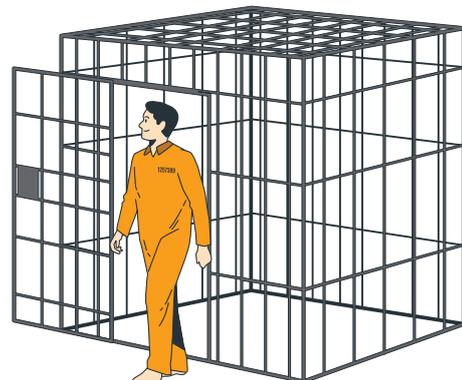
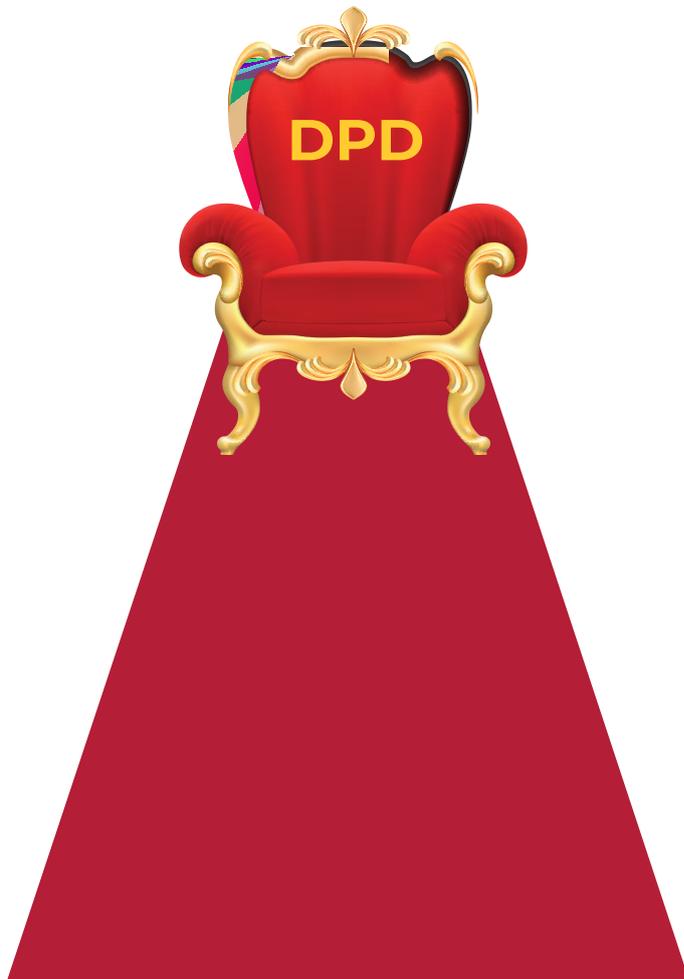
Walhasil, MK dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menyatakan menolak seluruh permohonan E. Ramos Petege ihwal perkawinan beda agama. Ramos adalah pemeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam.



Mantan Terpidana Calon Anggota DPD

Mantan terpidana yang ingin mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Itulah salah satu poin amar Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan ini diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Perludem.



Parpol Non-Parlemen Tak Bisa Usung Capres

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu ihwal syarat pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak menghalangi hak konstitusional PKN. Sebagai parpol baru, PKN tetap dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu 2024

dengan bergabung dengan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian pertimbangan hukum Putusan Nomor 16/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan PKN tidak dapat diterima.



Jaksa Tak Berwenang Ajukan PK

Penambahan kewenangan jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan mengakibatkan disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK. Selain itu, berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 menyatakan mengabulkan seluruh permohonan perkara pengujian UU Kejaksaan. Permohonan diajukan Hartono yang menguji kewenangan kejaksaan mengajukan peninjauan Kembali (PK).



Dilarang Kampanye di Tempat Ibadah

Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan ihwal pelarangan tempat kampanye dalam UU Pemilu. Permohonan diajukan Handrey Mantiri dan Ong Yenny.

Dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan. Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".









MEMPERKUAT INTEGRITAS DAN INOVASI ICT

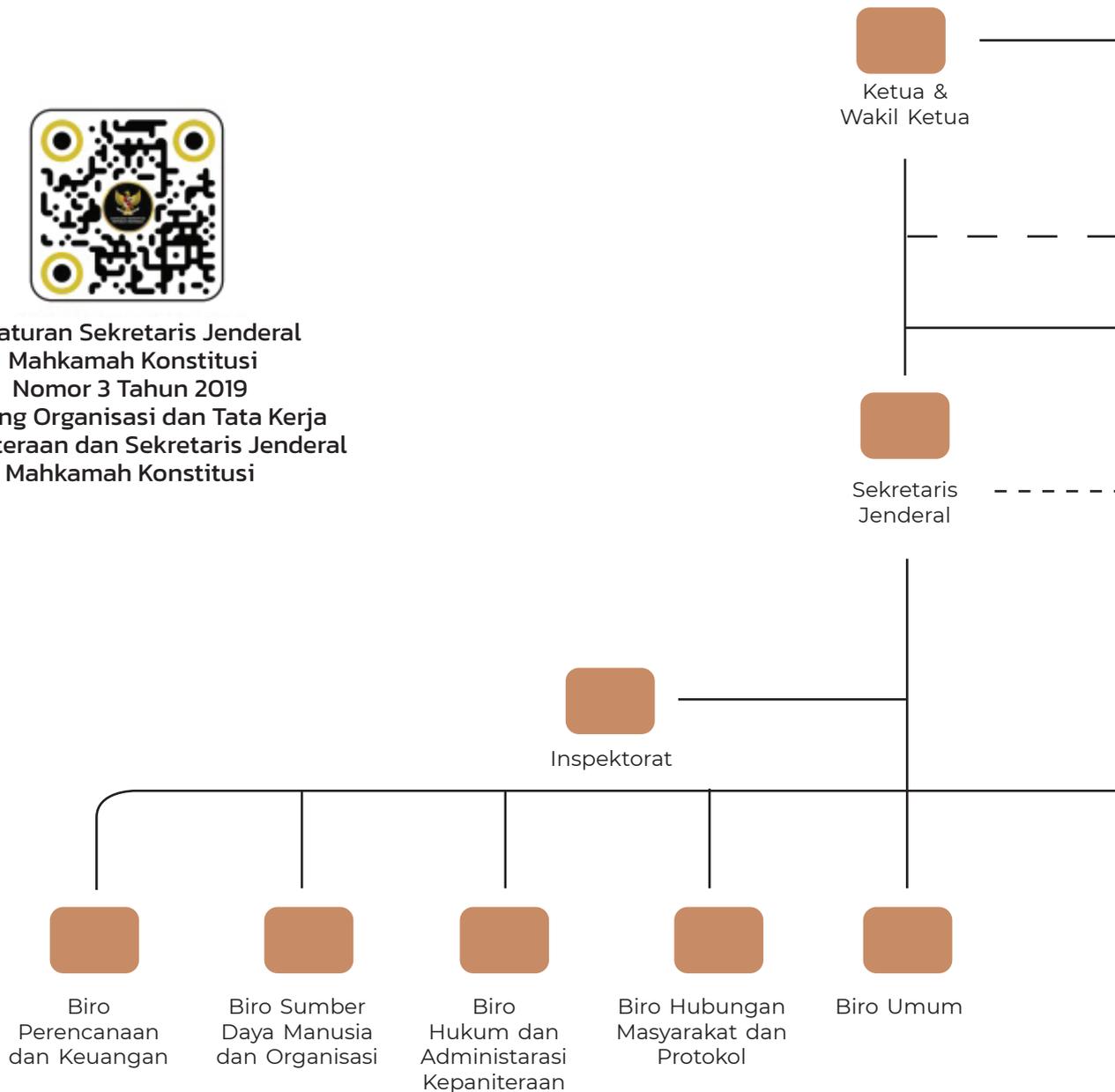
Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Integritas dan inovasi ICT adalah dua hal yang saling terkait dan saling mendukung dalam mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya di Mahkamah Konstitusi

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

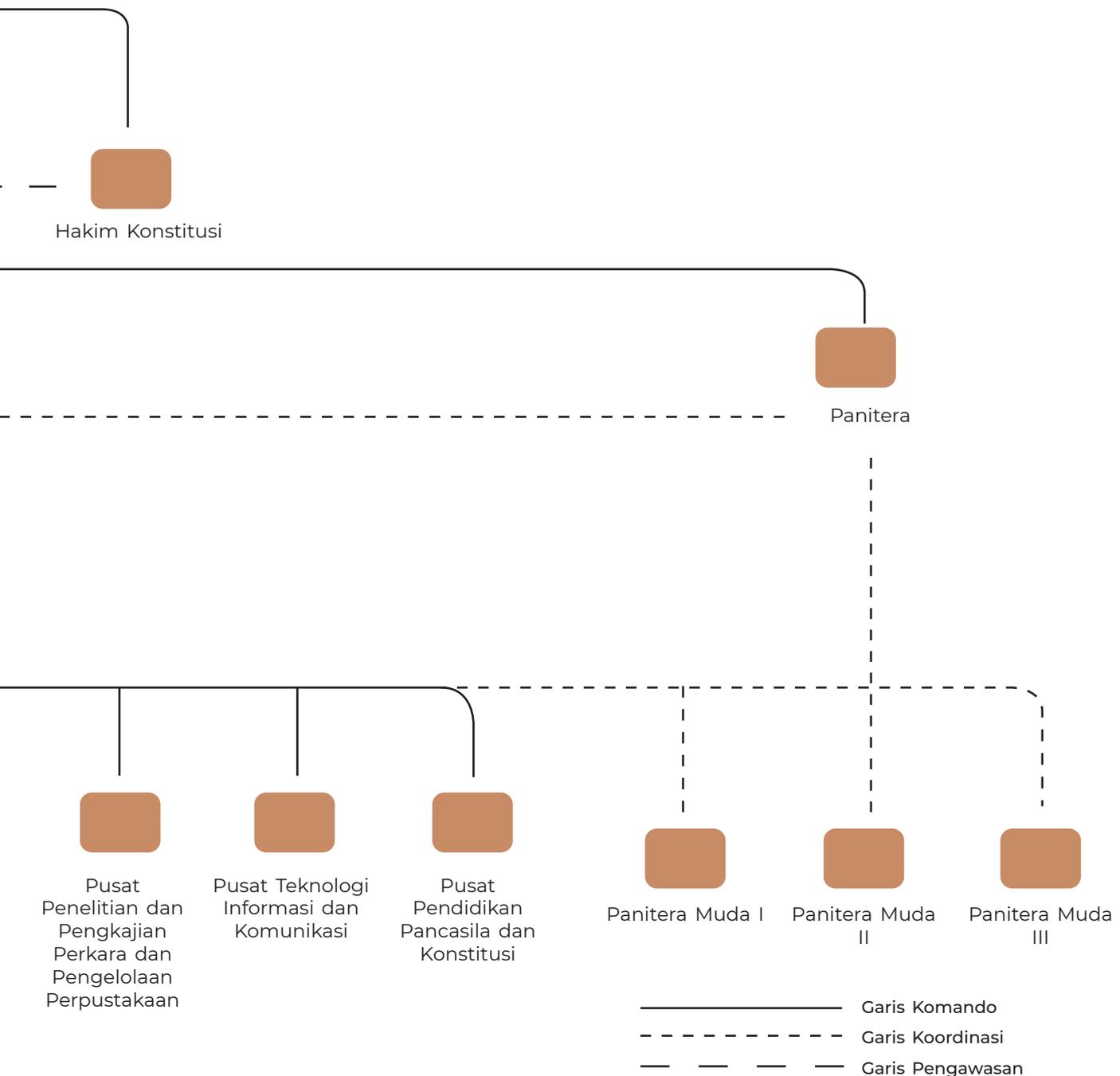
Struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



Peraturan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi



Struktur organisasi dan tata kerja tersebut akan berubah seiring dengan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023, terutama pada struktur organisasi Kepaniteraan. Dalam putusan dimaksud, organisasi Kepaniteraan akan terdiri dari jabatan fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI).



2. Kapasitas SDM

Sebagai motor penggerak utama bagi pencapaian visi dan misi MK, dukungan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan senantiasa menjadi perhatian utama bagi MK.

Perkembangan SDM

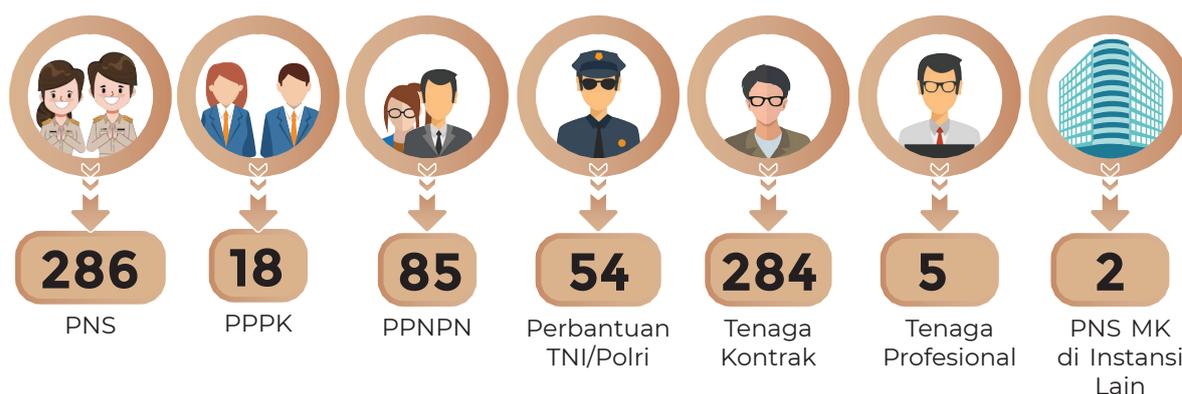


Jumlah Pegawai Mahkamah
Konstitusi per 31 Desember 2023

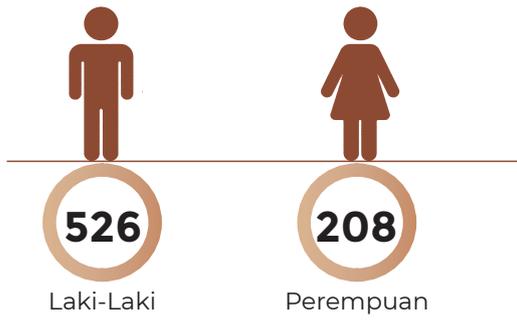
a. Berdasarkan Unit Kerja

Panitera	1
Sekretaris Jenderal	1
Kepaniteraan	21
Biro Perencanaan dan Keuangan	37
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	39
Biro Umum	410
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	71
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	43
Inspektorat	14
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	27
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	37
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	16
PNS MK di Instansi Lain	2

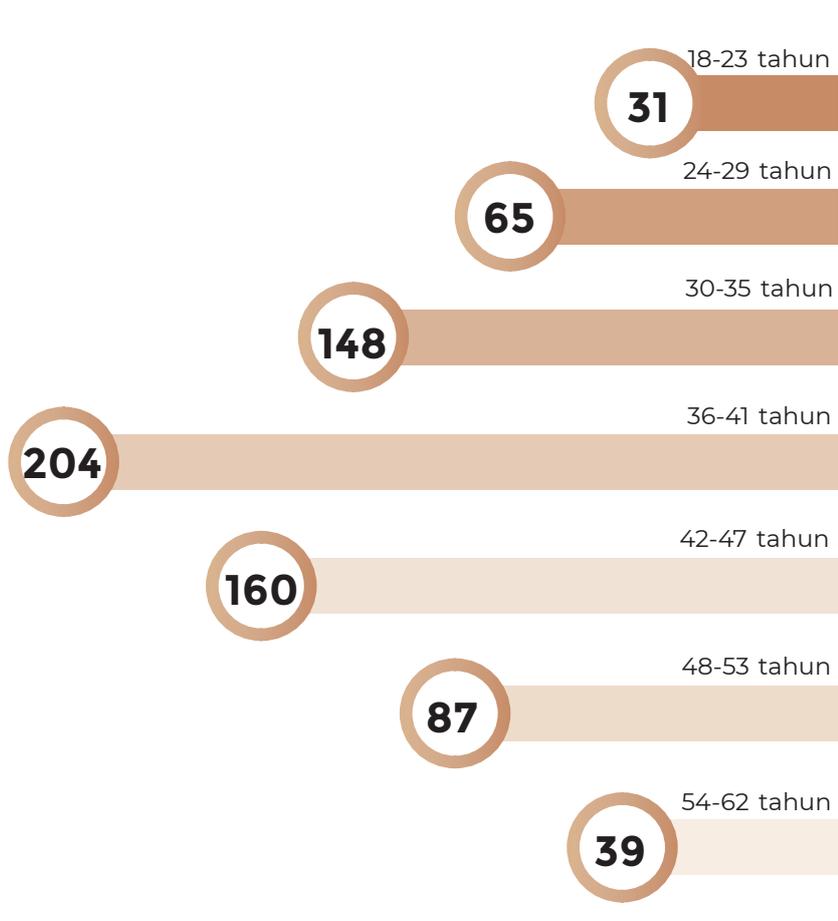
b. Berdasarkan Status Kepegawaian



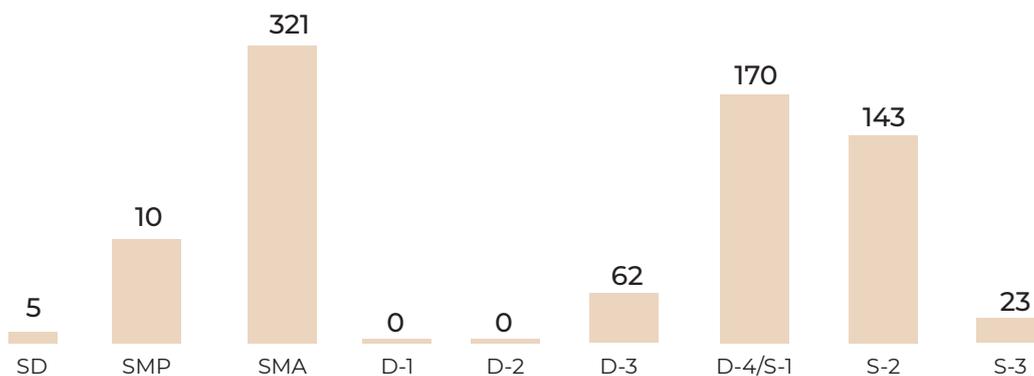
c. Berdasarkan Jenis Kelamin



d. Berdasarkan Usia



e. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

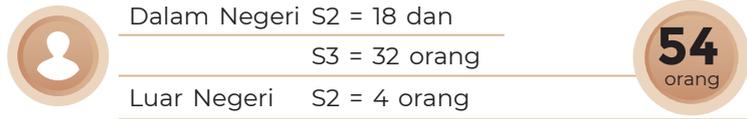


Program Rintisan Gelar

Bentuk optimalisasi kompetensi sumber daya yang ada pada lembaga, MK pada 2023 ini mengirim sejumlah pegawai dengan status Tugas Belajar dan Izin Belajar, baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 67 pegawai yang mengikuti Rintisan Gelar.



Jumlah Pegawai yang berstatus Tugas Belajar di tahun 2023



Jumlah Pegawai yang berstatus Izin Belajar di tahun 2023



Dari pegawai yang mengikuti program Rintisan Gelar, 45 orang pegawai memulai studi pada 2023; 16 orang dalam proses studi; dan 6 orang telah dinyatakan lulus.



Mengikuti Rintisan Gelar



Pegawai dalam Proses Studi



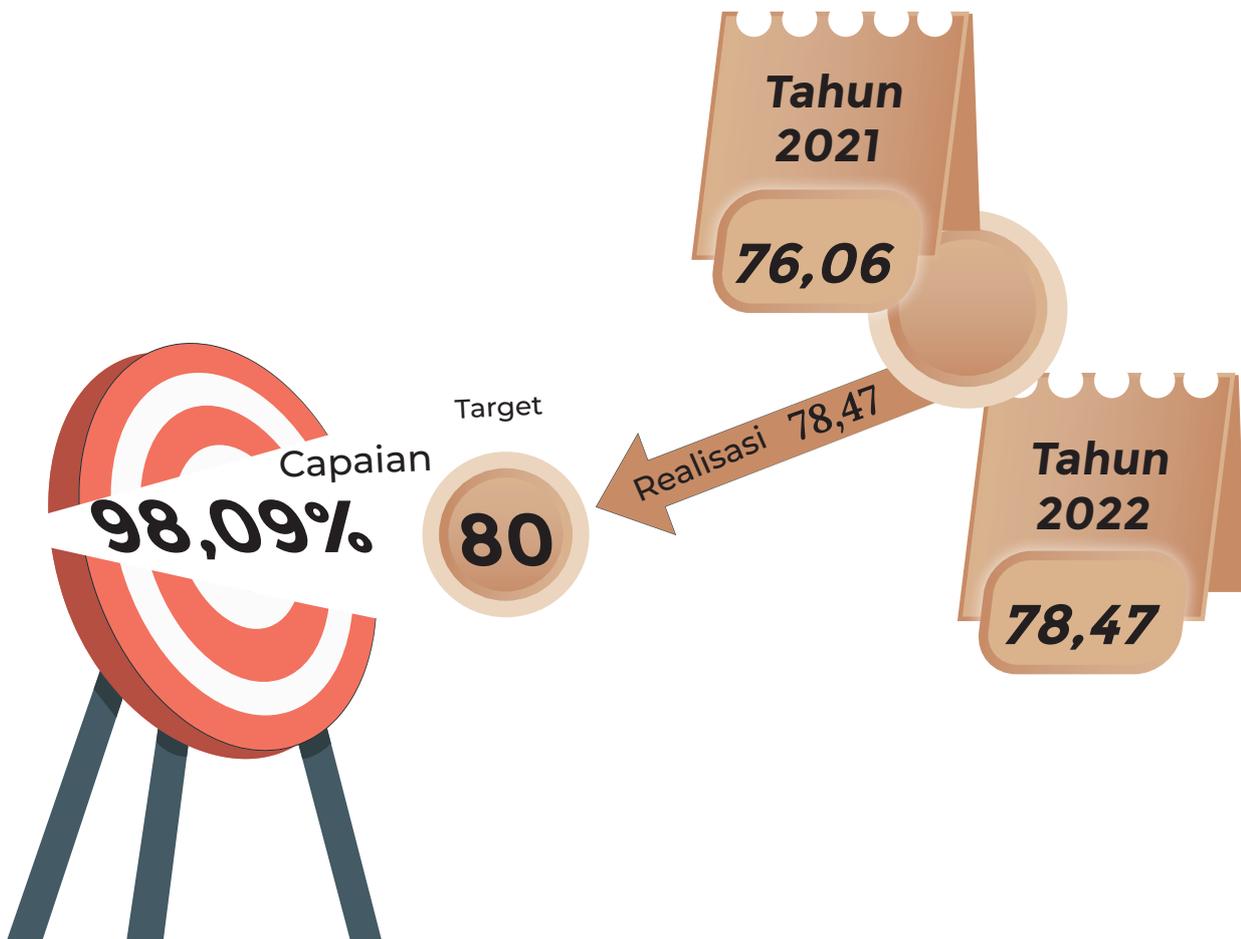
Lulus

Perkembangan Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan berdasarkan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada 2022, capaian Indeks Reformasi Birokrasi MK berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nilai 78,47. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2021 dengan nilai 76,06.



Arsip

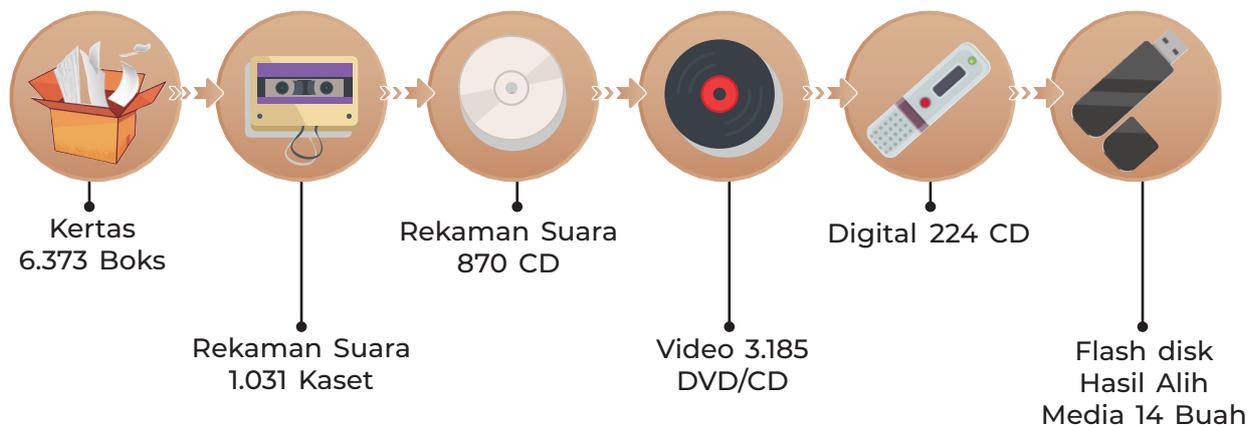
Penyerahan Arsip ke ANRI

Pada 2023, MK telah dua kali menyerahkan arsip ke Arsip Nasional RI, yaitu pada 10 Januari 2023 dan November 2023.

Dalam rentang waktu 2006 - 2023, MK telah menyerahkan 2.816 berkas yang terdiri dari 6.373 arsip kertas, 1.031 arsip kaset rekaman suara, 870 CD, 3.185 arsip video DVD/CD, serta arsip hasil alih media (digital) berupa 224 CD dan 14 *flash disk*.



Arsip Mahkamah Konstitusi yang diserahkan ke Arsip Nasional Tahun 2006-2023 (Berdasarkan Jenis Arsip)

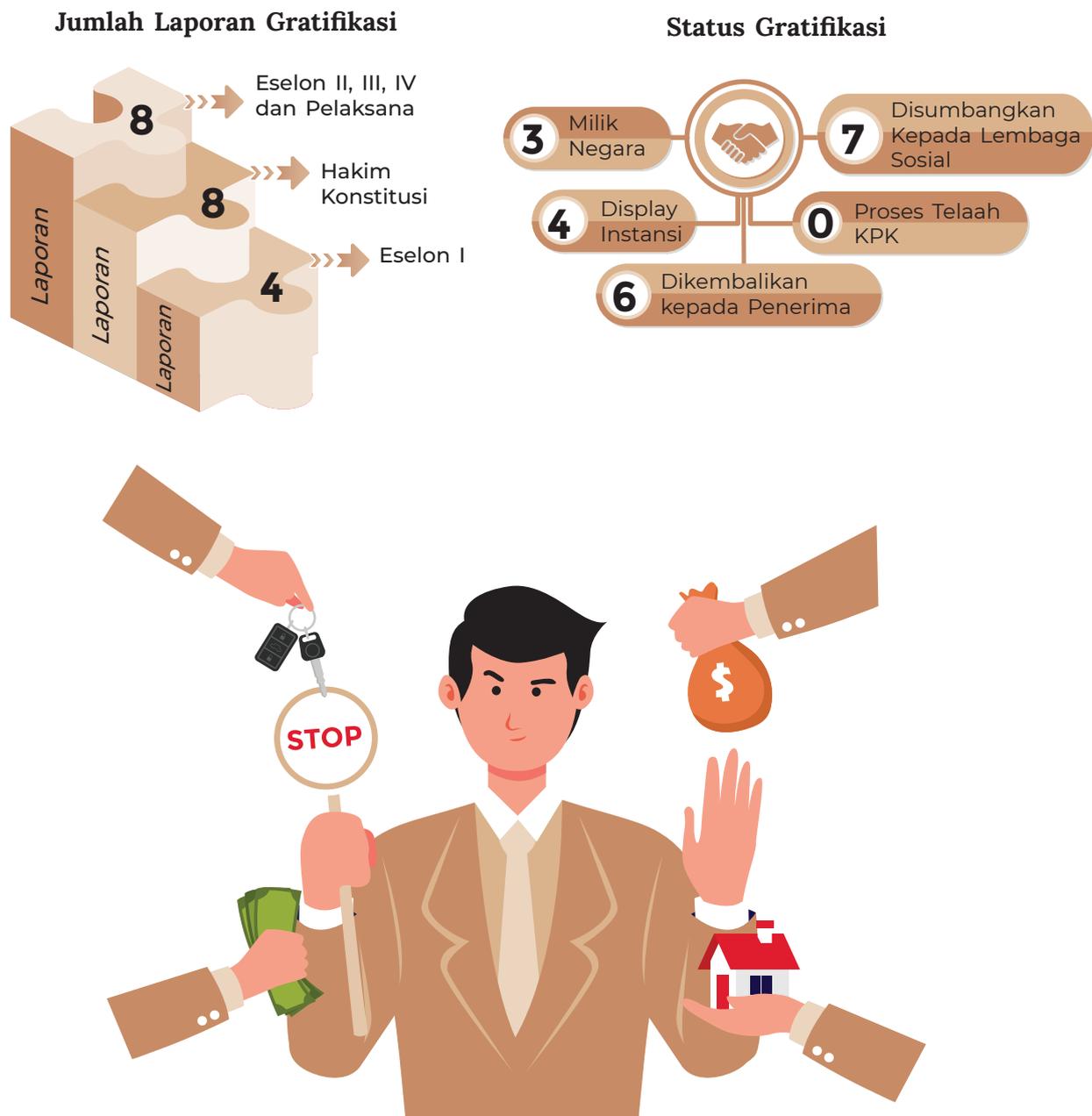


Pengawasan Internal Perkuat Kinerja

Pengelolaan Gratifikasi

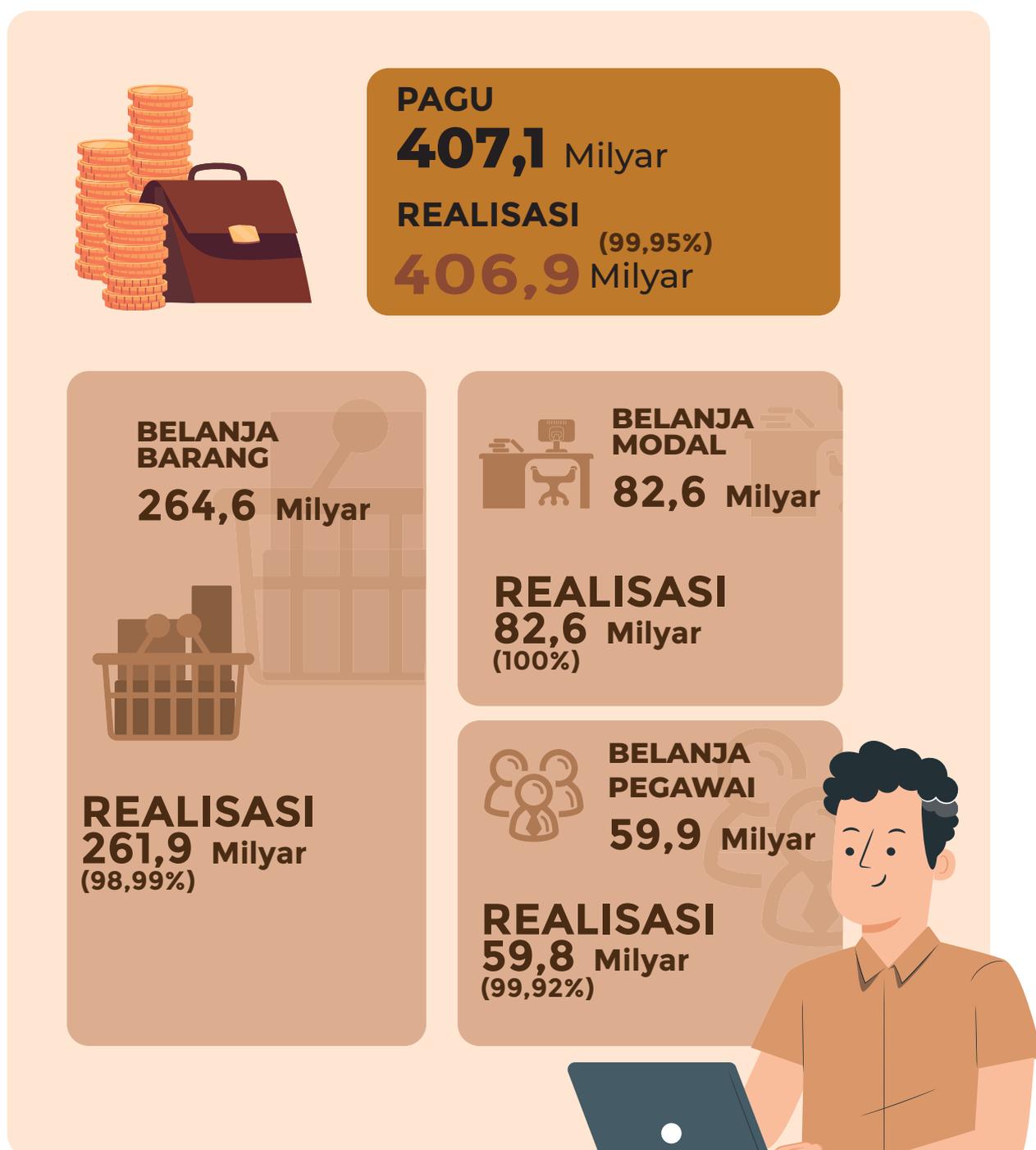
Pada 2022, MK menerima 21 laporan gratifikasi. Sementara itu, MK menerima 20 laporan gratifikasi pada periode Januari sampai dengan September 2023 yang terdiri dari 8 laporan Pejabat Eselon II, III, IV dan Pelaksana, 8 laporan Hakim Konstitusi, serta 4 laporan Pejabat Eselon I.

Setelah dilakukan penelaahan terhadap 20 laporan gratifikasi tersebut, ditetapkan status gratifikasi 3 Milik Negara, 4 Display Instansi, 6 Dikembalikan kepada Penerima, dan 7 Disumbangkan kepada Lembaga Sosial.



3. Laporan Keuangan MK

Dalam penggunaan anggaran negara, MK menjaga tradisi untuk selalu transparan dan akuntabel. Pergerakan dinamis penggunaan dan penyerapan anggaran per bulan secara real time dapat diakses di mkri.id.



4. Pengembangan dan Inovasi ICT



Pada 2023, MK melakukan pengembangan teknologi berupa aplikasi guna mendukung kelancaran, mempercepat proses, serta memberikan kemudahan pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.



SI Lembur

<https://lembur.mkri.id/>

Sistem yang terintegrasi dengan absensi online **apps.mkri.id** dan persuratan (**sikd.mkri.id** dan **sipanda2018.mkri.id**), ini dibangun pada tahun 2023.



Sistem Informasi Perjalanan Dinas

<https://espd.mkri.id/>

Sistem ini menjadi solusi dalam percepatan pertanggungjawaban keuangan dalam perjalanan tugas dinas yang dilakukan oleh pegawai MK.



Sistem Informasi Moot Court

<https://olimpiade.mkri.id/>

Salah satu dari fungsi kehumasan, Biro Humas dan Protokol MK menjalin kerja sama dengan sejumlah Fakultas Hukum di Indonesia. Adanya sistem ini memudahkan dalam monitoring dan penjadwalan kegiatan.



Fitur Tukin

<https://apps.mkri.id/>

Sistem yang terintegrasi dengan *database* pegawai dan absensi *online* ini, menjadi solusi kemudahan bagi bagian keuangan MK dalam memberikan hak keuangan kepada pegawai MK.



Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL)

<https://simpel.mkri.id/>



Di bangun dari tahun 2017 dan terus dikembangkan sampai pada tahun 2023 dengan menambahkan fitur yang disesuaikan dengan PMK dan PKMK tahun 2023. SIMPEL menjadi salah satu solusi kemudahan bagi para pencari keadilan di MK.



Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK)

<https://simpp.mkri.id/>



SIMPPK dibangun pada tahun 2011 dan terus dikembangkan sampai pada tahun 2023, SIMPPK dibangun agar mempermudah pekerjaan unit Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan dalam menangani perkara.



Sistem Informasi Minutasi

<https://e-minutasi.mkri.id/>



Di bangun sejak tahun 2018 dan terus dikembangkan hingga tahun 2023, dengan menambahkan fitur disesuaikan dengan PMK dan PKMK Tahun 2023. E-minutasi digunakan dalam menyimpan berkas perkara konstitusi dengan format digital.



Sistem Informasi SOP

<https://sopan.mkri.id/>



Sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi kearsipan (sikd.mkri.id dan sipanda2018.mkri.id) ini dibangun pada tahun 2020 dan terus dikembangkan hingga tahun 2023. Dengan adanya sistem ini setiap data SOP terdokumentasi secara digital.



Sistem Informasi Pencatatan BMN (SIMAK BMN)

<https://aset.mkri.id/>



Dibangun pada tahun 2021 dan terus dikembangkan hingga tahun 2023. SIMAK BMN digunakan untuk mencatat database fasilitas penunjang kinerja pegawai MK. Sistem ini terintegrasi juga dengan *database* pegawai MK dan interoperabilitas dengan sakti Kementerian Keuangan.

5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada 2023, MK melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara dan Indeks Pelayanan Sistem Informasi. Survei tersebut melibatkan 87 responden eksternal MK, yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait.

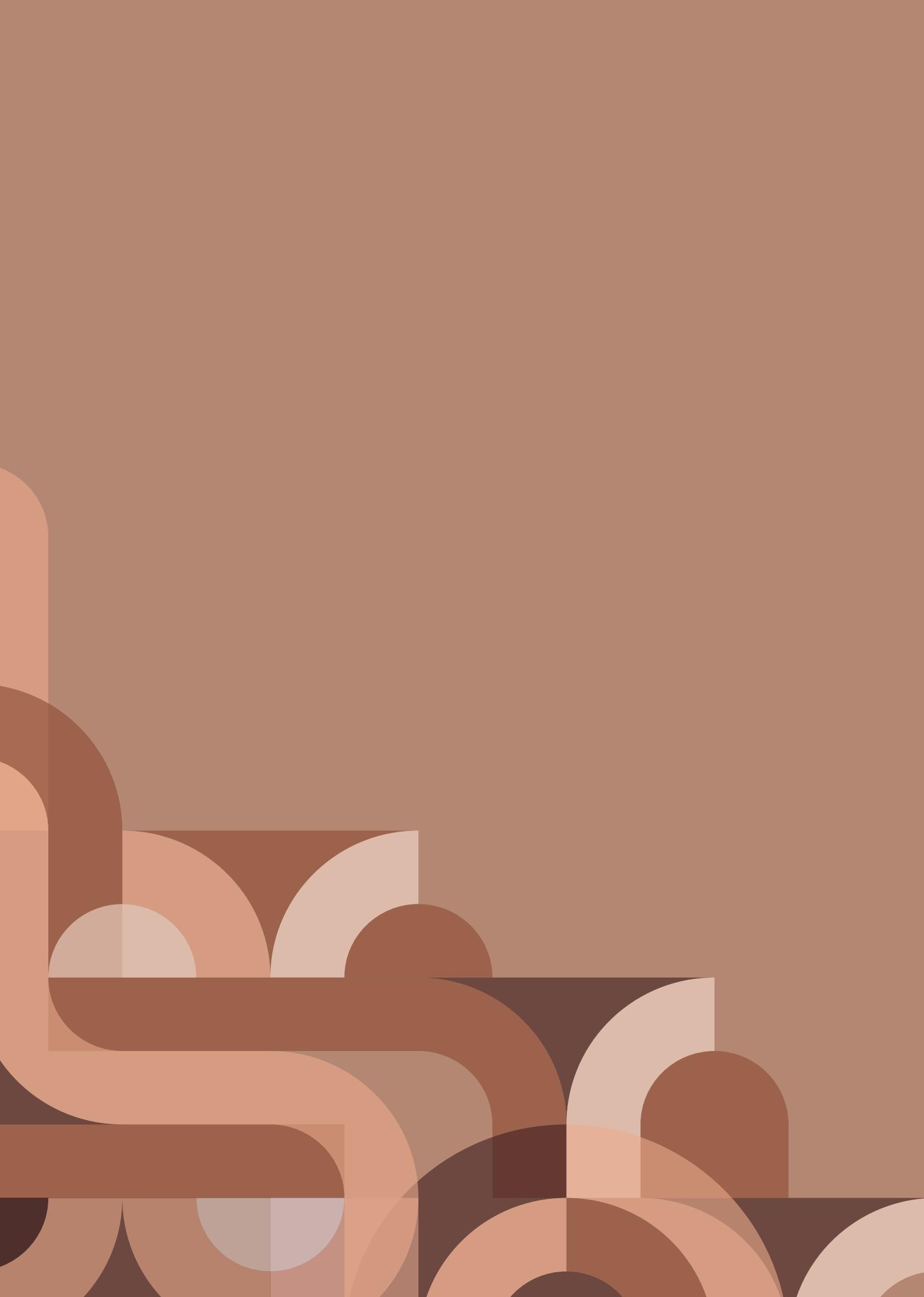
Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara mendapatkan nilai 87,65 dengan

nilai indeks persepsi kualitas pelayanan 3,506. Sementara itu, survei Indeks Pelayanan Sistem Informasi mendapatkan nilai 87,76 dengan nilai indeks kualitas pelayanan sebesar 3,51.

Nilai indeks tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai indeks dari hasil survei pada tahun 2022.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Tahun	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Indeks Pelayanan Sistem Informasi
1	2022	87,574	87,092
2	2023	87,65	87,76





MENGASAH NALAR BERKONSTITUSI

Pada 2023 sebagai wujud mengasah nalar berkonstitusi, MK membangun dan mengembangkan sinergitas lembaga melalui kerja sama dengan mitra, baik di dalam maupun luar negeri. MK juga melakukan penyebarluasan informasi melalui layanan perpustakaan dan kunjungan, media publikasi, serta pertemuan tatap muka dengan #Courtizen.



Ngopi Bareng Courtizen Jilid II

Besarnya minat penggunaan media sosial di Indonesia membuka kesempatan bagi MK untuk mengembangkan kegiatan berbasis *follower*. MK sendiri menyebut pengikutnya di media sosial sebagai #Courtizen. Setelah berhasil menginisiasikan Ngopi Bareng Courtizen pada 2022 lalu, MK kembali menggelar kegiatan yang sama bertajuk Ngopi Bareng Courtizen Jilid II pada 11 Agustus 2023.

Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian peringatan HUT ke-20 MK dengan tema “20 Tahun MK: Catatan dan Harapan Publik”. Acara yang digelar di depan Gedung I MK, dipandu oleh Cindy Sistryarani dan menghadirkan Wakil Ketua MK Saldi Isra sebagai narasumber. Sebanyak 100 #Courtizen hadir mendengarkan suka-duka perjalanan MK selama 20 tahun dan mimpi MK di masa mendatang.



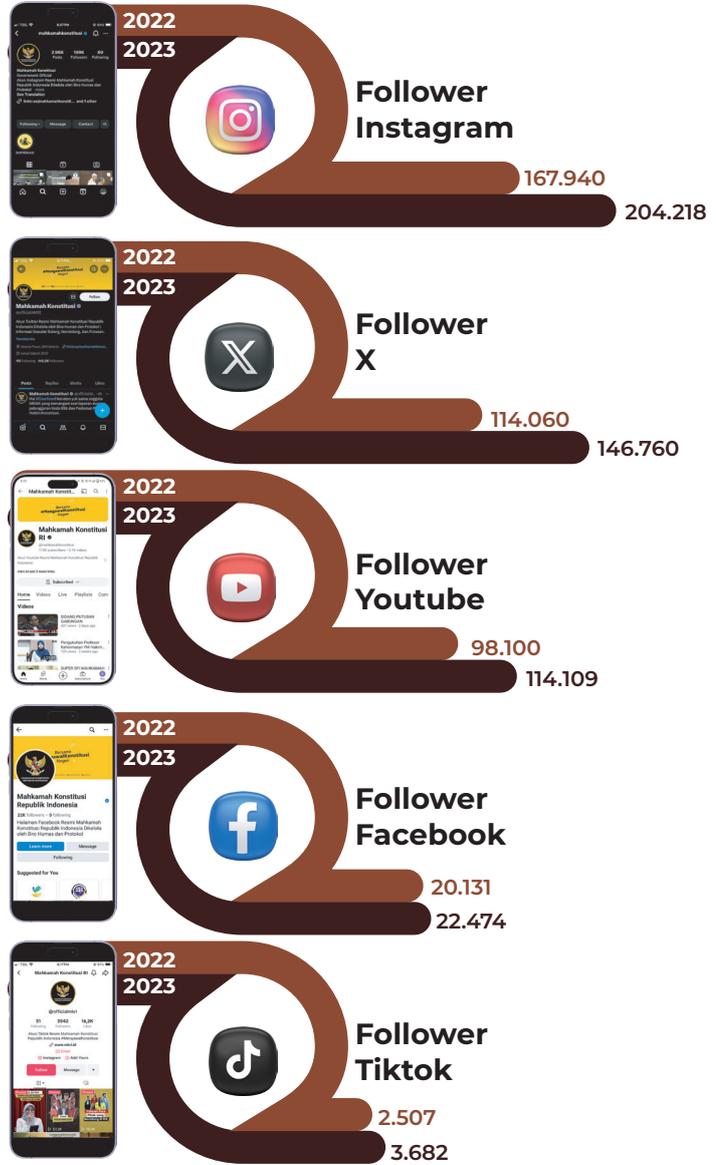
MEDIA SOSIAL

MK menjalankan upaya penyebaran informasi tentang konstitusi melalui lima platform media sosial, yaitu:

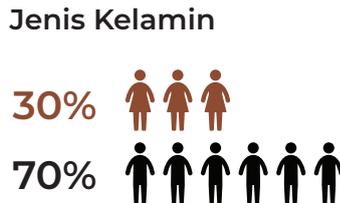
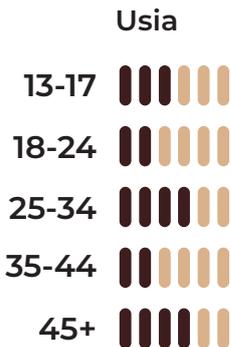
- 1 Instagram
- 2 X
- 3 Youtube, yang mencakup:
 - Siaran langsung (Live Streaming)
 - Podcast “Supremasi”
 - Iklan Layanan Masyarakat
 - Berita 2 Menit
- 4 Facebook
- 5 Tiktok

Melalui kelima platform ini, MK telah merangkul masyarakat melalui konten informatif dan atraktif.

Jumlah Pengikut Media Sosial



Demografi Pengikut Media Sosial

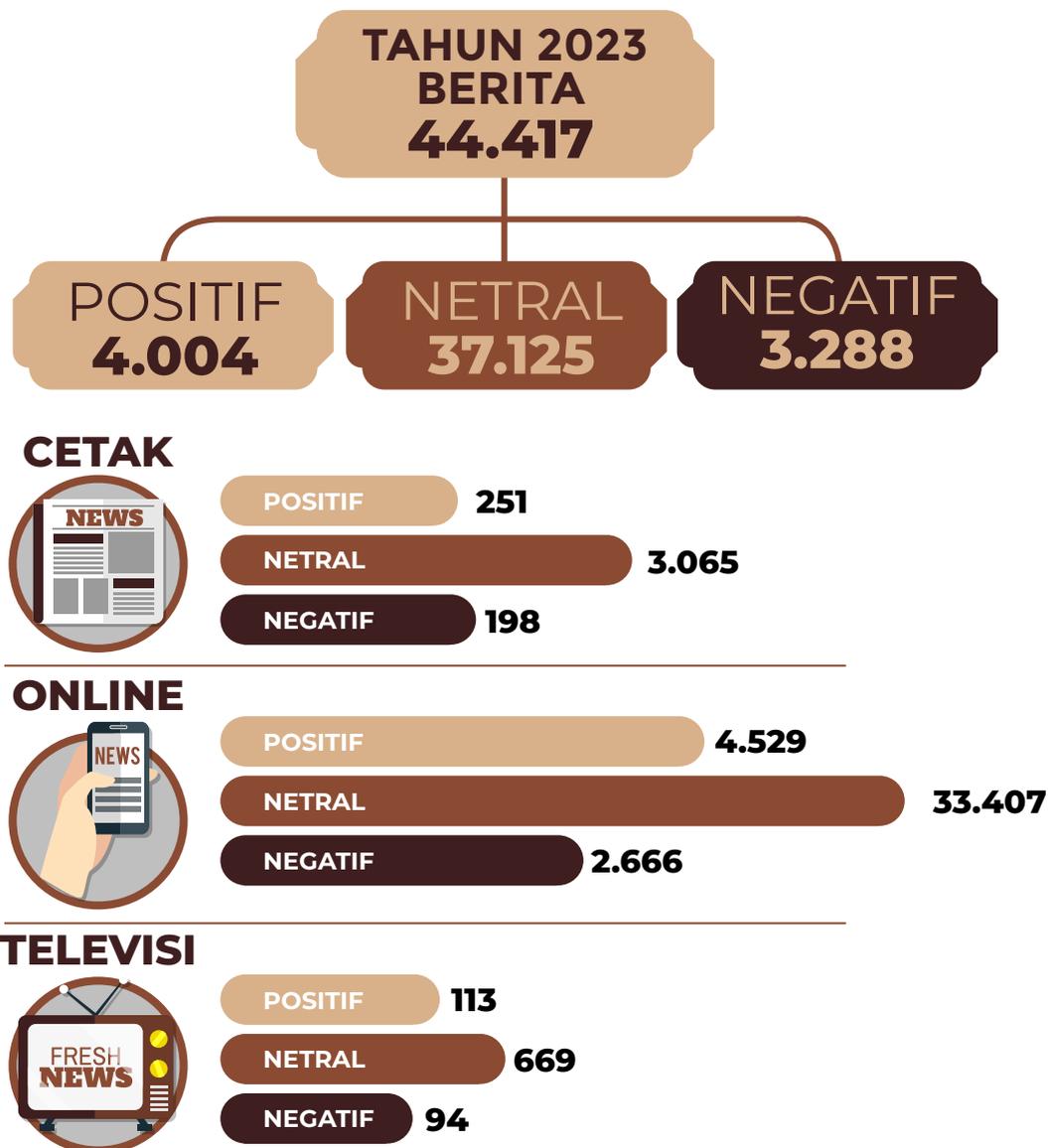


MK DALAM OPINI MEDIA

Pada 2023, MK telah memonitor 44.417 berita dengan kata kunci “Mahkamah Konstitusi” dari media nasional dan media lokal, meliputi 25 harian nasional, 70 harian daerah, 28 majalah dan tabloid nasional, 2000 portal berita *online* nasional/lokal/

internasional, 20 program berita stasiun televisi nasional, dan 5 stasiun radio.

Dari 44.417 berita, MK melakukan monitoring berita dengan kategori *tone* pemberitaan 4.004 berita positif, 37.125 berita netral, dan 3.288 berita negatif.



PELUNCURAN DAN BEDAH BUKU KARYA INSAN MK

Melanjutkan tradisi akademik insan MK dalam menuangkan gagasan dan pemikiran ke dalam bentuk buku, MK menggelar

Peluncuran 34 Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi pada 22 November 2023 di Gedung Perpustakaan Nasional.

34 JUDUL BUKU



KUNJUNGAN KE MK

Dalam memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, MK menerima kunjungan dari berbagai kalangan. Kunjungan tersebut berasal dari sekolah, perguruan tinggi,

instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pada 2023, MK menerima 92 kunjungan dengan keseluruhan jumlah pengunjung 4.715 orang.

**95 KUNJUNGAN
7.129 ORANG**



PERPUSTAKAAN MK

Dalam perannya mendukung perkembangan pendidikan serta sebagai pusat pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum, Perpustakaan MK terus memperbanyak koleksinya. Sampai dengan 2023, Perpustakaan MK telah memiliki 22.000 koleksi buku fisik dan 420 koleksi buku elektronik (*e-book*). Perpustakaan MK, telah dikunjungi oleh 1.604 pengunjung pada tahun 2023.

Jumlah pengunjung tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pengunjung pada tahun 2022.

Pada 2023, Perpustakaan MK meraih akreditasi A “Sangat Memuaskan” dari Perpustakaan Nasional dan menjadi mitra program Kampus Merdeka bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

TAHUN 2022 1.139 PENGUNJUNG



9
26
84
11
18
188
147
130
119
197
146
64

TAHUN 2023 1.604 PENGUNJUNG

JANUARI	114
FEBRUARI	226
MARET	104
APRIL	80
MEI	147
JUNI	134
JULI	137
AGUSTUS	160
SEPTEMBER	114
OKTOBER	160
NOVEMBER	132
DESEMBER	96



MITRA PERGURUAN TINGGI

- Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah
- Institut Pendidikan Indonesia Jawa Barat
- Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat
- Institut Teknologi Sumatera, Lampung
- Pesantren Amanah Muhammadiyah, Jawa Barat
- STPMD APMD Yogyakarta
- UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur
- UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat
- UIN Maulana Malik Ibrahim Jawa Timur
- UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
- Universitas Airlangga Jawa Timur
- Universitas Andalas Sumatera Barat
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta, DI Yogyakarta
- Universitas Balikpapan Kalimantan Timur
- Universitas Batam, Kepulauan Riau
- Universitas Bengkulu
- Universitas Bhayangkara Jakarta
- Universitas Borobudur DKI Jakarta
- Universitas Brawijaya Jawa Timur
- Universitas Diponegoro Jawa Tengah
- Universitas Dirgantara Marsekal
- Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Universitas Hasanuddin, Makassar
- Universitas Islam As Syafi'iyah Jakarta
- Universitas Islam Balitar, Jawa Tengah
- Universitas Islam Kadiri Jawa Tengah
- Universitas Islam Sultan Agung Jawa Tengah
- Universitas Katolik Atma Jaya, DI Yogyakarta
- Universitas Kristen Maranatha, Jawa Tengah
- Universitas Kristes Inonesia Makassar
- Universitas Mahasaraswati Bali
- Universitas Muhammadiyah Bima
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Universitas Mulawarman, Kalimantan Tengah

SINERGI DI KANCAH NASIONAL

Sampai dengan 2023, MK menjalin kerja sama dengan 101 mitra dalam negeri yang terdiri dari instansi/lembaga, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

Pada tahun 2023, 99 kegiatan kerja sama dilakukan melalui kegiatan seminar, webinar, kuliah umum, diskusi publik dan lain-lain. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi masyarakat.

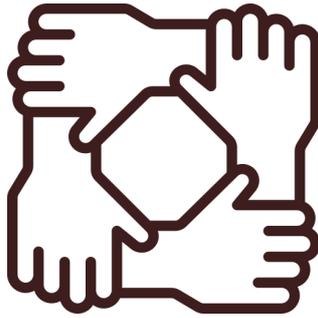


- Raya, DKI Jakarta
- ta
- r
- ngah
- Surya Darma DKI Jakarta
- arta
- ar
- awa Barat
- mur
- mur
- awa Tengah
- KI Jakarta
- awa Barat (2 kali)
- luku
- a Nusa Tenggara Barat
- atera Utara, Sumatera Utara
- karta, Jawa Tengah
- ntan Timur

- Universitas Musamus, Papua Selatan
- Universitas Negeri Jakarta DKI Jakarta
- Universitas Negeri Padang Sumatera Barat
- Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Jawa Tengah
- Universitas Nusa Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur
- Universitas Nusa Lontar Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
- Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah
- Universitas Pamulang Banten
- Universitas Pendidikan Indonesia Jawa Barat
- Universitas PGRI Palembang Sumatera Selatan
- Universitas Sumatera Utara
- Universitas Tadulako Sulawesi Tengah
- Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat
- Universitas Teuku Umar Aceh Aceh
- Universitas Udayana, Bali
- Universitas Warmadewa Bali



4
WEBINAR




4
JEJARING
KONSTITUSI



34
SEMINAR NASIONAL

99 KEGIATAN



15
AUDIENSI



24
KULIAH UMUM



6
DIKLAT



24 KEGIATAN
PENDIDIKAN KHUSUS
PROFESI ADVOKAT



7
DISKUSI PUBLIK



1
BEDAH BUKU

Pada tahun 2023, MK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan empat mitra kerja.



- 11 FEBRUARI**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA NTB
- 26 MEI**
UNIVERSITAS NUSA LONTAR ROTE NTT
- 19 AGUSTUS**
UNIVERSITAS SURAKARTA JAWA TENGAH
- 3 OKTOBER**
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
- 16 OKTOBER**
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JAKARTA

Festival Wasur Kampung Konstitusi

Kampung Wasur

Pada 2013, MK mengukuhkan Kampung Wasur, Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai Kampung Pancasila dan Konstitusi. Kemudian, 8 Juli 2023, MK menggelar Festival Wasur Kampung Konstitusi.



RANGKAIAN KEGIATAN

- FGD “Pengembangan Potensi Pariwisata di Wasur Kampung Konstitusi”
- Pameran UMKM dan Pentas Seni
- Lomba Mewarnai Tingkat SD/Sederajat
- Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP/Sederajat
- Lomba Pidato Konstitusi Tingkat SMA/Sederajat
- Pentas Seni
- Seminar Nasional
- Panggung Budaya
- Peletakan Prasasti Kampung Wasur

Olimpiade Konstitusi

Pada tahun 2023, MK bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas menggelar Olimpiade Konstitusi dengan tema "Menjaga Prinsip-Prinsip Pemilu Demokratis 2024" pada 5 - 11 Oktober 2023 di Padang, Sumatera Barat.

Olimpiade Konstitusi meliputi dua kegiatan, yaitu Pekan Konstitusi dan Kompetisi Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi. Pekan Konstitusi terdiri dari lomba pidato bahasa Inggris, lomba karya ilmiah bagi siswa SMA/ sederajat, lomba karya tulis ilmiah guru, lomba cerdas cermat, dan lomba debat konstitusi tingkat SMA/ sederajat.

PEMENANG PEKAN KONSTITUSI

Juara Umum Pekan Konstitusi



SMA Negeri 1 Gunung Talang

Juara I Lomba Pidato Bahasa Inggris



Aithra Acintya Bahrum
SMA Negeri 1 Solok

Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Siswa Siswi SMA atau Sederajat



Elshadani Christin & Fakhira Khairunissa
SMA Negeri 1 Padang

Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Guru



Ferry Mulyadi
SMA Islam As-Shofa Pekanbaru

Juara I Lomba Cerdas Cermat



SMA Negeri 1 Gunung Talang

Best Speaker Debat Konstitusi Tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sederajat



Selviana Marsyanda
SMAN 1 Pekanbaru

Juara I Lomba Debat Konstitusi Tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sederajat



SMA Negeri 2 Painan

PEMENANG KOMPETISI PERADILAN SEMU MAHKAMAH KONSTITUSI



Universitas Padjadjaran



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Universitas Gajah Mada

MONITORING DAN EVALUASI PUTUSAN MK

Pada tahun 2023, MK menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Putusan MK dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Kegiatan ini dilakukan dengan media monitoring dan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan para pemangku kepentingan Putusan MK.

FGD pertama dilaksanakan pada 7-9 September 2023 di Sleman, D.I. Yogyakarta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan empat putusan, yaitu Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017,

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Selanjutnya FGD kedua dilaksanakan pada 26-28 Oktober 2023 di Depok, Jawa Barat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dua putusan, yaitu Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berikutnya FGD ketiga dilaksanakan pada 7-9 Desember 2023 di Gedung 1 MK Jakarta Pusat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022.



Para pemateri yang dihadirkan dalam FGD monitoring dan evaluasi putusan MK, pada 7-9 September 2023 di Sleman.

SINERGI DI KANCAH INTERNASIONAL

Di kancah internasional, MKRI aktif mengembangkan jalinan kerja sama dengan MK atau institusi sejenis di berbagai negara. Jalinan kerja sama tersebut diwujudkan melalui kehadiran dalam konferensi/simposium internasional, *judicial dialogue*, anjang karya, *summer school*, dan *recharging program*. Kerja sama tersebut diselenggarakan dalam kerangka peningkatan kualitas putusan, dimana Hakim Konstitusi ataupun insan Mahkamah dapat memperkaya informasi dan pengetahuan yang akan bermanfaat untuk kiprah MKRI *ke depan*. Kunjungan

kerja tersebut juga sekaligus sebagai sarana dalam mendiseminasikan putusan-putusan monumental MKRI yang berkaitan dengan supremasi konstitusi, demokrasi dan hak asasi Manusia.

Pada tahun 2023, MKRI melakukan kunjungan kerja sama ke MK atau institusi sejenis di 16 negara. Di samping hal tersebut di atas, pada tahun 2023, MKRI bersama dengan Kementerian Luar Negeri berperan dalam penegasan keberpihakan hukum dan konstitusi Indonesia terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Universal Periodic Review (UPR) Siklus ke-4 pada Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss



ICJF

Salah satu wujud sinergi di kancah internasional yang dilakukan MKRI ialah menyelenggarakan International Chief Justice Forum (ICJF) dengan tema “Penguatan Demokrasi Melalui Yurisdiksi

Konstitusi: Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan” pada 10 Agustus 2023 di Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh delegasi dari MK atau institusi sejenis dari negara-negara Asia dan Afrika. Penyelenggaraan ICJF merupakan rangkaian peringatan 20 tahun MKRI yang secara khusus didedikasikan untuk perkembangan Mahkamah Konstitusi secara global, utamanya peran sentral Indonesia dalam turut mendorong kemajuan supremasi konstitusi di Asia-Afrika



GALA DINNER

INTERNATIONAL CHIEF JUSTICE FORUM “STRENGTHENING DEMOCRACY THROUGH CONSTITUTIONAL JURISDICTIONS: PAST, PRESENT AND FUTURE”

10 AUGUST 2023 JAKARTA, INDONESIA





Pada kesempatan yang sama, MKRI juga menyelenggarakan The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium. Simposium Internasional ini dilangsungkan pada 10 - 12 Agustus 2023

dengan tema “Mahkamah Konstitusi dan Independensi Peradilan: Sebuah Perspektif Komparatif”.

Peserta kegiatan ini terdiri dari para akademisi perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, peneliti, dan praktisi hukum, termasuk Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Tulisan-tulisan terpilih dari para pemakalah dimuat dalam *Constitutional Review* yang terindeks Scopus.





MKRI sebagai Sekretariat Tetap Association of Asian Constitutional Courts/ Equivalent Institutions (AACC) di Bidang Perencanaan dan Koordinasi, pada 2023 ini

kembali menyelenggarakan International Short Course of AACC (ISC) pada 10 Agustus 2023 di Jakarta dengan tema “Democracy, Digital Transformation, and Judicial Independence”. Peserta ISC ialah 40 orang *legal officers* MK atau institusi sejenis dari 14 negara anggota AACC, termasuk Panitia Konstitusi (PASTI).



Penandatanganan Nota Kesepahaman

Pada tahun 2023 MKRI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan supremasi hukum dengan MK Mongolia, MK Angola, dan

MK Aljazair. Penandatanganan tersebut merupakan penegasan atas keseriusan MKRI dalam turut mendorong supremasi konstitusi di kancah global.



Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Konstitusi Mongolia
9 Agustus 2023



Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Konstitusi Angola
9 Agustus 2023



Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Konstitusi Aljazair
10 Agustus 2023

Recharging Program

Penyelenggaraan Recharging program dan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan bertaraf internasional lainnya merupakan kegiatan kerja sama internasional yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

MKRI menyelenggarakan Recharging Program melalui kerja sama dengan National Center for State Courts dan William and Mary Law School, Amerika Serikat. Program bertema “Restructuring Constitutional Democracy” ini dilaksanakan di dua kota, yaitu Williamsburg dan Washington DC pada 5 Juni – 1 Juli 2023.

Peserta Recharging Program terdiri dari tiga Panitera Konstitusi, tiga Asisten Ahli Hakim Konstitusi, dan dua pegawai lainnya.

Summer School

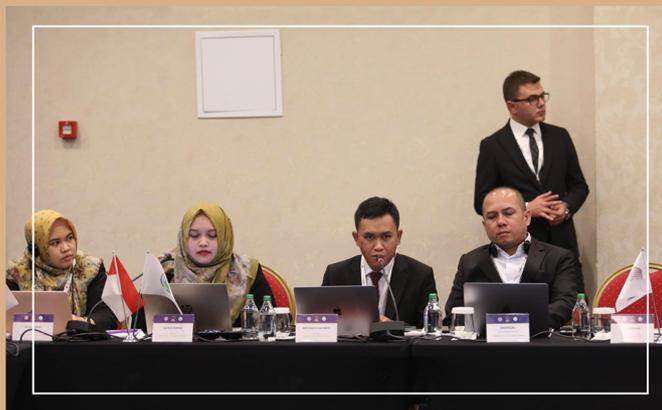
Pada 2023, MKRI mengirimkan empat orang pegawai untuk mengikuti Summer School ke-11 yang diselenggarakan oleh MK Turkiye pada 18 – 21 September 2023 di Ankara, Turkiye. Kegiatan ini mengangkat tema “Judicial Independence as a Safeguard of the Right to a Fair Trial”. Summer School merupakan kegiatan tahunan MK Turkiye sebagai sekretariat tetap bidang *human resource development* AACC.



Peserta Recharging Program kerja sama MKRI dengan National Center for State Courts dan William and Mary Law School, Amerika Serikat.



Perwakilan MKRI dalam agenda Summer School ke-11 yang diselenggarakan oleh MK Turkiye pada 18 – 21 September 2023 di Ankara, Turkiye.







PENGHARGAAN

MK mendapatkan berbagai penghargaan atas kiprahnya hingga tahun 2023. Penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi dari berbagai pihak atas apa yang telah dilakukan MK. Tahun 2023, MK menerima sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga/instansi lain untuk berbagai kategori prestasi.



Constitutional Review ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 1

Jurnal Konstitusi ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2



Piagam Penghargaan Dari Arsip Nasional RI



Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2023



Peringkat 3 BKN Award 2023

Dari Badan Kepegawaian Negara

Atas capaian Implementasi
Penerapan Manajemen Kinerja

Peringkat 3 BKN Award 2023

Dari Badan Kepegawaian Negara

Atas capaian dalam
Pengembangan Kompetensi



WTP 17 Kali Berturut-turut

Dari Badan Pemeriksaan Keuangan

Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan
dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) 17 kali berturut-turut.





Perpustakaan MK meraih Predikat Akreditasi A Tahun 2023

Penghargaan sebagai Instansi Terbaik Pertama

Atas Pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2023



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Silver Play Button

Atas 100.000 Subscriber Kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI





Biro Umum MK meraih Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2023

Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian



Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara

Atas Keberhasilan Dalam Melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Mekanisme Manajemen Talenta

Juara 1

Tingkat Lembaga
Kategori Website Mahkamah Konstitusi





20
TH



MENYONGSONG PEMILU 2024

Jelang pesta demokrasi pada 2024 dan sebagai gerbang terakhir dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, MK melakukan sejumlah persiapan, antara lain pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, revitalisasi sarana dan prasarana, pengembangan teknologi informasi, dan pembentukan gugus tugas.

PEMBARUAN REGULASI

Pada tahun 2023, MK melakukan pembaruan regulasi dengan menetapkan enam peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1 PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- 2 PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 3 PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- 4 PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- 5 PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum
- 6 PMK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi



Link PMK



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PHPU

Dalam rangka mendukung kelancaran Pemilu 2024, MK menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi

pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, seperti partai politik, advokat, KPU, Bawaslu, dan tim hukum, baik capres-cawapres maupun caleg.

BIMTEK PHPU TAHUN 2023



PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN *WORKSHOP*

Untuk memberikan dukungan terhadap tugas dan wewenang dalam memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, MK membentuk Gugus Tugas yang akan mulai bekerja sejak Januari sampai dengan Desember 2024.

Seiring dengan itu, untuk meningkatkan kesiapan penanganan perkara PHPU, MK menyelenggarakan *workshop* bagi Gugus Tugas.



PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DI GEDUNG MK

Guna mengakomodasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan organisasi, serta memudahkan

koordinasi dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan kewenangan, pada 2023 ini MK mulai melakukan revitalisasi gedung.

Gedung I akan digunakan untuk ruang sidang, ruang kerja Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, Panitera, Panitera Konstitusi, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi.



GEDUNG 1



GEDUNG 2



GEDUNG 3

MK juga melakukan penandatanganan perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dengan Kementerian Sekretariat Negara pada 27 Juni 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, MK dapat menggunakan Gedung milik Kementerian

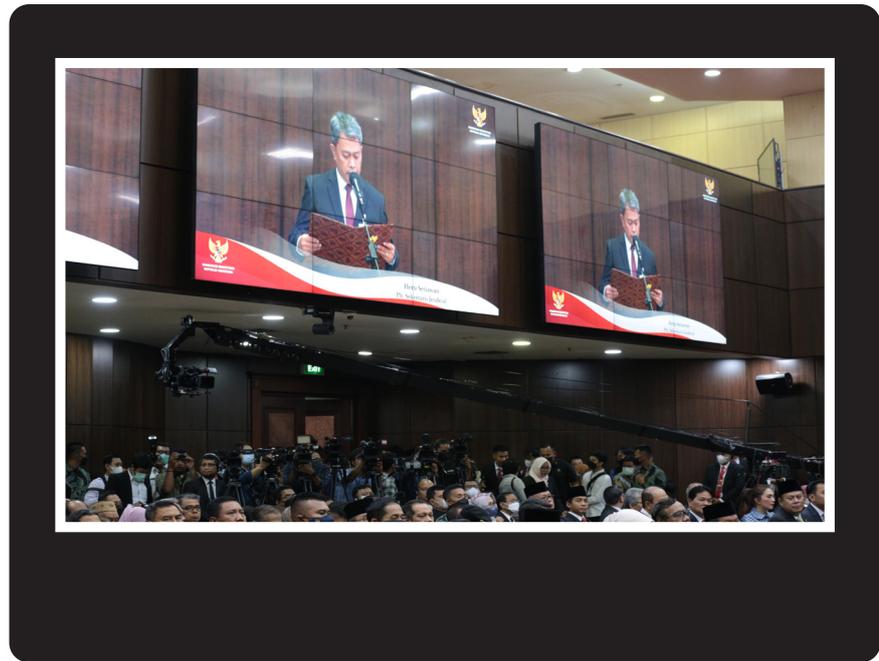
Sekretariat Negara yang sebelumnya juga pernah digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Gedung ini akan digunakan untuk ruang kerja pegawai yang memberikan dukungan administrasi umum.



MODERNISASI FASILITAS PERSIDANGAN

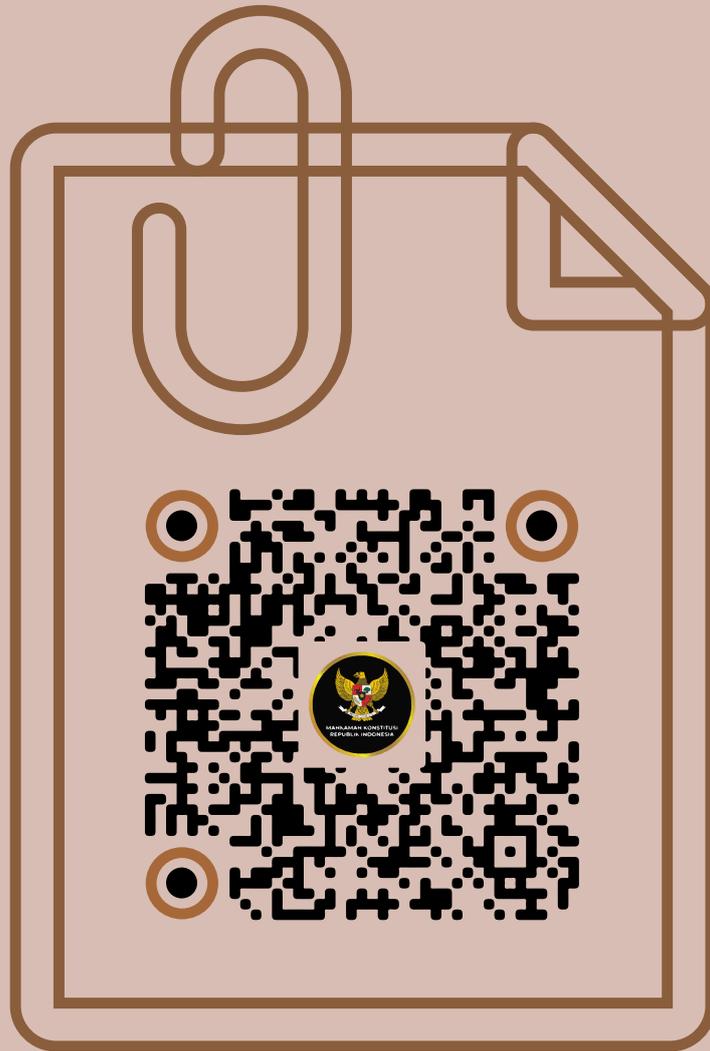
Pada tahun 2023, MK melakukan modernisasi fasilitas persidangan mencakup peningkatan kualitas sistem tata suara dan video (*audio-video system*), multimedia, dan penataan ruang kendali persidangan

(*master control room/MCR*) di Ruang Sidang Pleno dan Ruang Sidang Panel. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan persidangan MK, khususnya pada saat penanganan perkara PHPU 2024.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN



AKSES LEBIH LANJUT KLIK TAUTAN
<https://humas.mkri.id/home/laporantahunan2023>

LAPORAN TAHUNAN 2023
MAHKAMAH KONSTITUSI

Glosarium

AACC	: Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions	MK	: Mahkamah Konstitusi
ASLI	: Asisten Ahli Hakim Konstitusi	MKMK	: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara	Pemilu	: Pemilihan Umum
APHAMK	: Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK	Perppu	: Peraturan Pengganti Perundang-undangan
APHTN-HAN	: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara	PHPKADA	: Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu	PHPU	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Bimtek	: Bimbingan Teknis	PKMK	: Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi
BKN	: Badan Kepegawaian Negara	PKPA	: Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Caleg	: Calon Anggota Legislatif	PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
CCJA	: the Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa	PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Dapil	: Daerah Pemilihan	Pusdik	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Daring	: Dalam jaringan	Puskon	: Pusat Sejarah dan Dokumentasi Konstitusi
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat	PUU	: Pengujian Undang-Undang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah	RB	: Reformasi Birokrasi
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat	SDM	: Sumber Daya Manusia
FGD	: Forum Group Discussion	SKLN	: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia	SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kelola
ICCIS	: The Indonesian Constitutional Court International Symposium	Smart Board	: Smart Board Mini Courtroom
ICJF	: International Chief Justice Forum	UU	: Undang-Undang
KPU	: Komisi Pemilihan Umum	UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
Luring	: Luar Jaringan	Webinar	: Web Seminar
MA	: Mahkamah Agung		

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 23529000
email: office@mkr.id
www.mkri.id